

# Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional



VOLUME 17 NOMOR 2 | ISSN: 2527 - 435X

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

# LAPORAN NUSANTARA

APRIL 2022

# **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
PRAKATA	iii
BAGIAN I Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAGIAN II</b> Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	3
BOKS 1 Digitalisasi Logistik dalam Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Antardaerah	14
<b>BOKS 2</b> Pengembangan <i>Solar Photovoltaic</i> (Solar PV) untuk Mendukung Akselerasi Trar Energi Hijau	15 nsisi
BOKS 3  Ketahanan Cadangan Nikel dalam Mendukung Penguatan Struktur Industri Na	16 siona
BAGIAN III Isu Strategis: Sinergi dan Percepatan Implementasi Digitalisasi Pembayaran dalam Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pemulihan Ekonomi Nasional	17
<b>BOKS 4</b> Aspek Persiapan, Sistem, dan Pelaksanaan Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Bansos	26

Ĭ



# **Prakata**

erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

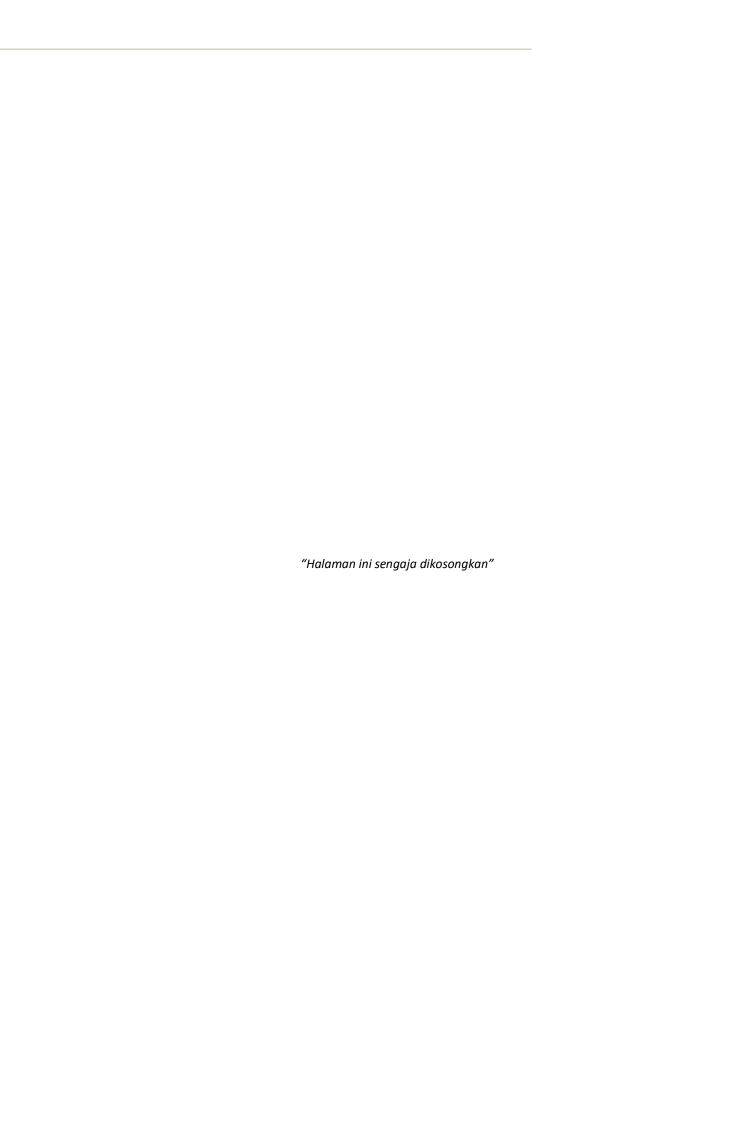
Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah, termasuk mengupas perekonomian wilayah di tengah mengemukanya tantangan global maupun domestik. Publikasi Laporan Nusantara edisi kali ini juga mengangkat isu strategis mengenai "Sinergi dan Percepatan Implementasi Digitalisasi Pembayaran dalam Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pemulihan Ekonomi Nasional". Upaya untuk mempercepat implementasi digitalisasi pembayaran terus ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengoptimalkan perkembangan teknologi digital guna mendukung perbaikan ekonomi nasional yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah, serta memberikan informasi spasial bagi masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

Jakarta, 27 April 2022

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Solikin M. Juhro
Direktur Eksekutif



#### **BAGIAN 1**

### Ringkasan Eksekutif

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diprakirakan tetap berlangsung pada triwulan I 2022. Berlangsungnya perbaikan tersebut ditopang peningkatan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah terutama pada akhir triwulan I 2022 seiring dengan penurunan penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron yang mendorong pelonggaran restriksi mobilitas. Kondisi tersebut didukung berlanjutnya akselerasi vaksinasi dan program booster sejak awal tahun, serta dukungan stimulus untuk mendorong konsumsi. Di sisi lain, Rusia-Ukraina ketegangan geopolitik diprakirakan berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global di tengah akselerasi normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS dan negara maju lainnya. Sampai dengan triwulan I 2022, kinerja ekspor nonmigas tetap kuat, khususnya yang berbasis sumber daya alam, ditopang kenaikan harga komoditas. Perkembangan tersebut diprakirakan menopang kinerja lapangan usaha (LU), seperti LU Industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Balinusra. Kinerja investasi juga masih cukup baik, khususnya terkait relokasi korporasi di Jawa, proyek hilirisasi di Sulampua, dan proyek pendukung penyelenggaraan acara internasional di Balinusra. Namun kinerja ekspor nonmigas ke depan diprakirakan tertahan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global akibat berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina.

Prospek permintaan domestik dan permintaan eksternal menopang proses perbaikan kinerja LU utama daerah di tengah dinamika ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Penurunan kasus COVID-19 di seluruh wilayah dan pelonggaran Level PPKM mendorong peningkatan mobilitas khususnya dimulai pada akhir triwulan I 2022. Kondisi tersebut diprakirakan mendukung aktivitas produksi di tengah perbaikan permintaan domestik dan eksternal yang masih cukup tinggi sehingga menjaga tetap kuatnya kinerja LU Industri Pengolahan, meski terdapat potensi risiko kenaikan harga bahan baku seiring berlanjutnya konflik Rusia - Ukraina. Sementara itu, LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) diprakirakan tumbuh positif meski sempat tertahan penyebaran COVID-19 varian Omicron di awal tahun yang menahan tingkat okupansi hotel di sejumlah kota besar. Kinerja Akmamin juga diprakirakan ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) seiring dengan penyelenggaraan event internasional. Kenaikan harga komoditas tambang utama menopang kinerja LU Pertambangan, meski diprakirakan lebih rendah

dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi pengalihan ekspor batubara untuk kebutuhan domestik pada awal tahun 2022. Kinerja LU Pertanian juga diprakirakan membaik ditopang produksi tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit. Perbaikan kinerja tabama dan holtikultura juga mendukung kinerja LU Pertanian. Hal ini didukung kondisi cuaca yang lebih kondusif terutama memasuki semester II 2022. Namun terdapat risiko kenaikan harga pupuk sebagai dampak tidak langsung konflik Rusia-Ukraina. Sejalan dengan kinerja investasi, perbaikan LU Konstruksi diprakirakan membaik berlanjutnya pembangunan ditopang infrastruktur pemerintah dan proyek konstruksi swasta di berbagai daerah, meski lebih terbatas karena tertahannya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di daerah.

Dengan perkembangan tersebut, perbaikan kinerja ekonomi di seluruh wilayah untuk keseluruhan 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Sejumlah indikator konsumsi serta investasi menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik meski tidak sebelumnya. sekuat prakiraan Sementara Pemerintah Daerah 2022 secara bertahap diprakirakan meningkat sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Ke depan, sumber pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik, khususnya kinerja LU non-tradable. Di sisi lain, permintaan eksternal diprakirakan lebih rendah sejalan dengan moderasi perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan rantai pasokan. Perekonomian di berbagai wilayah juga diprakirakan akan dipengaruhi tertahannya volume ekspor di tengah kenaikan harga energi dan pangan global. Namun terdapat potensi untuk meningkatkan volume ekspor dengan mengisi pasar Rusia, meskipun diprakirakan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut diprakirakan memengaruhi kinerja LU Utama di berbagai wilayah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan sedikit lebih rendah dalam kisaran 4,5-5,3% dari prakiraan sebelumnya di kisaran 4,7-5,5%. Prospek perekonomian tersebut masih didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan booster.

Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah berbasis digitalisasi untuk mendukung perbaikan ekonomi perlu terus didorong. Perekonomian akan dihadapkan pada sejumlah tantangan di wilayah di tengah proses perbaikan permintaan domestik yang ditopang menurunnya kasus COVID-19, didukung akselerasi vaksinasi dan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Berlanjutnya tekanan konflik Rusia - Ukraina diprakirakan mendorong pelemahan kinerja eksternal yang berimplikasi pada permintaan domestik. Sementara itu, perkembangan digitalisasi selama pandemi yang pesat telah mendorong peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Namun efisiensi perdagangan antar daerah belum efisien sehingga masih terbuka penguatan melalui digitalisasi rantai suplai. Selain itu, kenaikan harga energi sebagai dampak tensi geopolitik global di tengah kebutuhan domestik yang meningkat mendorong diperlukannya transisi menuju energi hijau lebih cepat dengan mengembangkan potensi salah satu sumber energi terbarukan. Isu digitalisasi rantai suplai dan energi terbarukan tersebut akan menjadi salah isu khusus yang akan dibahas pada Bagian II. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD), yang difokuskan pada 3 (tiga) area utama, yaitu digitalisasi integrasi Bansos (G2P 4.0), Transaksi Pemerintah Daerah (melalui P2DD), dan Transportasi, dengan pemanfaatan skema Mobility as a Service (MaaS) dan Account Based Ticketing (ABT) dalam integrasi moda transportasi, guna mendorong berkembangnya ekosistem transaksi pembayaran berbasis digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini akan dibahas lebih detail pada Bagian III Isu Strategis: "Sinerai dan Percepatan Implementasi Digitalisasi Pembayaran dalam Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pemulihan Ekonomi Nasional".

Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I 2022 meningkat kendati masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dipengaruhi khususnya inflasi inti dan administered prices (AP). Inflasi inti meningkat seiring perbaikan permintaan domestik di semua wilayah, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Inflasi kelompok AP dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi volatile food (VF) dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, kenaikan harga komoditas VF lainnya dipengaruhi oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke harga impor dan biaya produksi. Sementara itu, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, yang antara lain disebabkan oleh kendala struktural dalam pola produksi dan kelancaran distribusi. Pada 2022, inflasi diprakirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0%±1% sejalan dengan memadainya penawaran agregat dalam memenuhi permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global perlu diwaspadai. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 9 Maret 2022.

#### **BAGIAN 2**

### Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

#### Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diprakirakan tetap berlangsung pada triwulan I 2022. Peningkatan mobilitas masyarakat seiring penurunan penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron serta kinerja ekspor nonmigas yang tetap kuat, khususnya yang berbasis sumber daya alam, ditopang kenaikan harga komoditas menjaga keberlangsungan perbaikan perekonomian di berbagai daerah. Perkembangan tersebut diprakirakan menopang kinerja lapangan usaha (LU), seperti LU Industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Balinusra.

Perbaikan kinerja ekonomi di seluruh wilayah untuk 2022 lebih rendah dari prakiraan keseluruhan **sebelumnya.** Perbaikan permintaan domestik terus berlanjut didukung penurunan kasus COVID-19, pelonggaran restriksi mobilitas, dan belanja Pemerintah Daerah yang secara bertahap diprakirakan meningkat. Namun perbaikan permintaan domestik tidak sekuat prakiraan sebelumnya karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Sejalan moderasi perekonomian global permintaan eksternal juga diprakirakan lebih rendah dan sumber pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik, khususnya kinerja LU non-tradable. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan sedikit lebih rendah dalam kisaran 4,5-5,3% dari prakiraan sebelumnya kisaran 4,7-5,5%. Prospek perekonomian tersebut masih didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, didukung berlanjutnya peningkatan mobilitas serta akselerasi vaksinasi dan booster.

### Kinerja Permintaan

#### Ekspor Luar Negeri

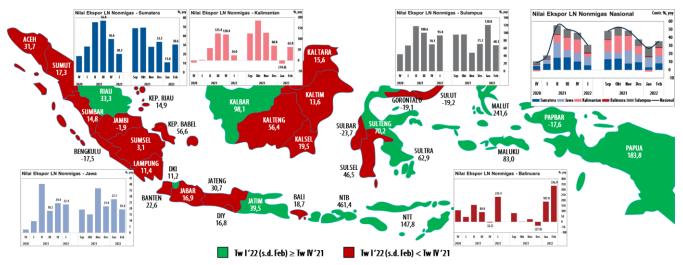
Ekspor nonmigas di berbagai daerah pada triwulan I 2022 diprakirakan tetap tumbuh tinggi, meski melambat dibandingkan triwulan IV 2021 (Gambar II.1).

Tetap tingginya ekspor nonmigas dipengaruhi kenaikan harga komoditas meski permintaan eksternal mulai melambat di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Kinerja ekspor ditopang oleh wilayah berbasis manufaktur, terutama Jawa dan Sulampua. Kinerja ekspor Jawa didukung oleh kinerja sejumlah produk manufaktur utama, terutama TPT seiring berlanjutnya limpahan order

dari Tiongkok, serta alas kaki, otomotif, dan furniture. Sejalan dengan Jawa, kinerja ekspor Sulampua juga meningkat ditopang oleh produk manufaktur besi baja seiring masih kuatnya permintaan manufaktur Tiongkok. Sementara itu, kinerja ekspor tembaga Sulampua juga meningkat untuk memenuhi kuota ekspor yang berakhir pada Maret 2022. Sejalan dengan Sulampua, perbaikan ekspor tembaga dalam rangka memenuhi kuota ekspor di tengah tingginya harga komoditas tembaga mendukung kinerja eskpor Balinusra. Sementara itu, kinerja ekspor Kalimantan diperkirakan melambat meski tetap positif, terutama akibat penurunan ekspor batu bara seiring dengan pengalihan ekspor temporer pada Januari 2022 untuk memenuhi pasokan pembangkit listrik domestik. Namun, kinerja ekspor batu bara tetap positif didukung masih tingginya harga batu bara sehingga menjadi insentif untuk eksportir. Sejalan dengan Kalimantan, batu bara menjadi faktor utama perlambatan kinerja ekspor Sumatera. Pelemahan juga terjadi pada ekspor CPO dipengaruhi moderasi permintaan Tiongkok di tengah peningkatan kebutuhan domestik.

Kinerja ekspor berbagai komoditas utama daerah pada 2022 diprakirakan tetap tumbuh positif meski dibawah prakiraan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Kinerja ekspor <u>Jawa</u> diprakirakan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya seiring dengan terbatasnya permintaan mitra dagang untuk produk manufaktur akibat konflik Rusia-Ukraina. Lebih lanjut, disrupsi pasokan akibat ketegangan geopolitik tersebut turut berdampak pada kenaikan harga bahan baku, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kinerja industri di Jawa, terutama industri mamin dan TPT. Di Kalimantan, kinerja ekspor juga diprakirakan lebih rendah dari prakiraan seiring dengan terbatasnya ekspor batu bara akibat pengalihan ekspor untuk kebutuhan domestik pada awal tahun. Namun, level harga yang masih tinggi akan menjadi insentif untuk eksportir. Di sisi lain, ekspor Sumatera diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya ditopang perkiraan harga batu bara dan CPO yang tinggi selama 2020 serta didukung produksi CPO yang masih kuat di tengah menurunnya volume ekspor batu bara. Kinerja ekspor Sulampua juga diproyeksikan tumbuh lebih kuat dari prakiraan sebelumnya ditopang oleh ekspor produk nikel sejalan dengan perkembangan harga yang tinggi. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina berpotensi membuka peluang perluasan pasar ekspor Sulampua ke Uni Eropa yang didukung oleh kuatnya pasokan nikel dan telah terpenuhinya aspek standardisasi produk untuk pasar Eropa oleh industri domestik. Di <u>Balinusra</u>, kinerja ekspor juga diprakirakan lebih tinggi dari perkiraan seiring dengan peningkatan kuota ekspor tembaga. Di <u>Sumatera</u>, kinerja ekspor diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya

seiring berlanjutnya prospek kenaikan harga komoditas utama ekspor. Kendati demikian, kenaikan harga pupuk akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina diprakirakan berdampak pada pemupukan yang kurang optimal serta menahan produksi TBS dan CPO.

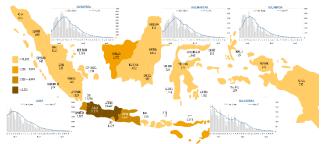


Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan 1 2022 s.d. Februari 2022)

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2022 (%yoy)

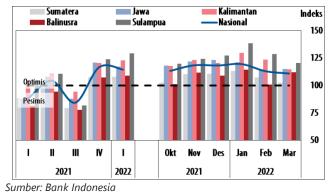
#### Konsumsi Swasta

Kinerja konsumsi swasta pada triwulan I 2022 diprakirakan masih kuat, seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Penyebaran COVID-19 varian Omicron meningkat pesat pada awal 2022 setelah temuan pertama diumumkan pada Desember 2021 dan mencapai puncak pada Februari 2022. Namun, jumlah kasus harian turun dengan cepat di seluruh wilayah dan telah melewati puncaknya (Grafik II.1), lebih cepat dibandingkan penurunan kasus COVID-19 pada periode penyebaran varian Delta. Perkembangan tersebut, disertai akselerasi vaksinasi dan dimulainya program booster sejak awal tahun, serta pembatasan mobilitas yang cenderung tidak seketat periode sebelumnya turut mendukung perbaikan penjualan ritel sepanjang triwulan I 2022. Keyakinan konsumen tetap berada pada level optimis, dengan perbaikan yang lebih cepat di Jawa-Bali sejalan dengan penurunan kasus COVID-19 (Grafik II.2). Sejumlah kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia turut menjaga perbaikan konsumsi pada triwulan I 2022, yang mencakup antara lain berlanjutnya relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) low cost green car (LCGC), loan to value (LTV)/financing to value (FTV) properti dan kendaraan bermotor, serta pajak pertambahan nilai (PPN) properti.



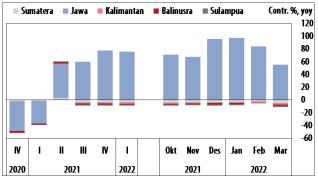
Sumber: Satgas Penanganan COVID-19, diolah. Keterangan: angka pada peta merupakan jumlah kasus kumulatif dalam 1 bulan terakhir, grafik merupakan jumlah kasus harian. Data sampai dengan 15 April 2022.

Grafik II.1. Kasus COVID-19 Daerah



Grafik II.2. Indeks Keyakinan Konsumen

Kinerja konsumsi swasta pada 2022 diprakirakan terus membaik dibandingkan 2021, meski sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di tengah dinamika geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan tersebut sejalan dengan meredanya kasus COVID-19 yang didukung oleh tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang cukup tinggi, akselerasi vaksinasi, serta dukungan kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Pada minggu ketiga April 2022, PPKM level 3 diterapkan hanya pada 10% kabupaten/kota di Indonesia dan tidak terdapat daerah dengan PPKM level 4. Selain itu, ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam menyambut HBKN Idul Fitri diperlonggar, sehingga diperkirakan mendukung prospek perbaikan konsumsi dalam jangka pendek dengan tetap menerapkan protokol kesehatan<sup>1</sup>. Perbaikan kinerja lapangan usaha juga mendorong kesempatan kerja yang masih tumbuh positif (Grafik II.3), sehingga mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan prospek perbaikan konsumsi ke depan. Di sisi lain, tekanan harga energi dan pangan global sebagai dampak peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina berpotensi memengaruhi prospek perbaikan permintaan domestik ke depan.



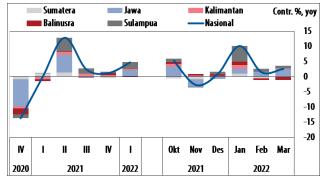
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.3. Indikator Ketersediaan Lapangan Kerja

#### Investasi

Kinerja investasi diprakirakan tetap kuat pada triwulan I 2022 ditopang oleh berbagai wilayah. Investasi bangunan masih sejalan dengan prakiraan, sementara investasi nonbangunan masih cukup kuat. Perbaikan investasi Sumatera terutama didorong oleh kinerja investasi bangunan pemerintah dengan berlanjutnya antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan sejumlah proyek investasi pemerintah non-proyek strategis nasional lainnya. Investasi bangunan juga menopang perbaikan investasi di Jawa tercermin dari peningkatan penjualan semen pada triwulan I 2022 (Grafik II.4), baik dari proyek swasta seperti pembangunan smelter, maupun proyek pemerintah seperti pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan penyelesaian proyek strategis nasional. Sementara itu, perbaikan kinerja investasi di Balinusra didukung oleh berlanjutnya proyek pembangunan 8 (delapan) bendungan dan proyek terkait Pariwisata. Di sisi lain, kinerja investasi di Kalimantan melambat dipengaruhi

oleh tertahannya realisasi beberapa proyek *multiyears* prioritas pemerintah yang terkendala isu pembebasan lahan atau ketersediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, perlambatan juga terjadi di <u>Sulampua</u> seiring dengan sejumlah proyek pembangunan pemerintah yang mulai memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja investasi nonbangunan yang masih kuat terindikasi dari berlanjutnya pembangunan kilang minyak Tuban Pertamina – Rosneft serta investasi smelter di Sulampua.



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik II.4. Penjualan Semen Wilayah

# Kinerja investasi tahun 2022 diprakirakan membaik dari tahun 2021 meski di bawah prakiraan sebelumnya.

Kinerja investasi Sumatera membaik didorong oleh realisasi proyek investasi pemerintah, baik yang direncanakan pada 2022 maupun yang tertunda dari 2021. Perbaikan kinerja investasi juga terjadi di Jawa ditopang oleh akselerasi realisasi proyek pembangunan smelter tembaga dan emas Freeport, ekosistem electric vehicle, data center, dan berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis nasional yang tertunda dari tahun 2021. Kendati demikian, kinerja investasi di Jawa diprakirakan tidak setinggi prakiraan sebelumnya disebabkan adanya kendala terkait pembebasan lahan dan keterlambatan penyelesaian pada sejumlah proyek. Selain itu, dampak krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat juga memengaruhi perilaku investor untuk mengambil sikap wait and see sehingga menahan perbaikan kinerja investasi Sumatera dan Jawa. Di sisi lain, kinerja investasi di Kalimantan diprakirakan membaik di atas prakiraan didukung oleh proyek multiyears pemerintah maupun swasta, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), yang berpotensi meningkatkan minat investasi di Kalimantan. Demikian pula kinerja investasi Sulampua diprakirakan meningkat lebih tinggi dari prakiraan didukung berlanjutnya pembangunan sejumlah bendungan, irigasi, serta penambahan kapasitas smelter pirometalurgi nikel dan infrastrutur pendukungnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sebagaimana Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 16 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Sementara itu, investasi di <u>Balinusra</u> juga lebih baik dari prakiraan sebelumnya didorong akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung kegiatan internasional ASEAN *Summit* tahun 2023, di samping sejumlah proyek pembangunan lain seperti fasilitas pengolahan tembaga di NTB dan pengembangan tahap I KEK Kesehatan di Bali. Ke depan, prospek perbaikan investasi akan didukung oleh penguatan iklim investasi melalui optimalisasi implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan percepatan penyelesaian regulasi pendukung, serta berlanjutnya relokasi korporasi global ke Indonesia.

#### Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Stimulus fiskal di daerah masih relatif terbatas pada triwulan I 2022 meski penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tumbuh positif. Nominal realisasi belanja Pemerintah Pusat di daerah dan Pemerintah Daerah lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2021 setelah terjadi peningkatan belanja pemerintah di akhir tahun 2021 sebagaimana pola historisnya. Belanja pemerintah di daerah juga masih dapat dioptimalkan mempertimbangkan mayoritas belanja merupakan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran pensiun. Sementara itu, belanja barang dan jasa serta belanja modal masih terbatas, antara lain karena adanya penurunan biaya penanganan COVID-19 dan faktor kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja. Tertahannya belanja pemerintah di daerah juga tercermin dari jumlah dana Pemerintah Daerah di perbankan pada akhir Maret 2022 yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Di sisi lain, realisasi TKDD tercatat tumbuh positif hingga Maret 2022, terutama ditopang oleh penyaluran pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Tabel II.1). Hal ini berkontribusi positif pada meningkatnya simpanan Pemerintah Daerah di perbankan di tengah tertahannya belanja.

Kinerja belanja Pemerintah Daerah 2022 secara bertahap diprakirakan meningkat, meski diprakirakan melambat dibandingkan 2021 di tengah menurunnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022. Prospek perbaikan kinerja fiskal ke depan tertahan oleh faktor masih dilakukannya refocusing/realokasi anggaran penanganan COVID-19 berdasarkan perkembangan di masing-masing daerah dan proyeksi pendapatan daerah yang masih dinamis. Namun, sejumlah upaya ditempuh untuk mengakselerasi realisasi belanja Pemerintah Daerah dan memperkuat peran belanja

Pemerintah Daerah agar dampaknya pada pemulihan ekonomi lokal dapat dioptimalkan. Perbaikan pada ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD di awal tahun, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja di daerah. Selain itu, tantangan penyaluran TKDD yang terjadi pada 2021 akan dimitigasi dengan berbagai langkah pada 2022, antara lain melalui kegiatan edukasi/sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian relaksasi syarat salur. Langkah ini ditempuh agar TKDD dapat terealisasi secara tepat waktu dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Daerah. Pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)<sup>2</sup> pada akhir 2021 juga diharapkan mengurangi ketimpangan antardaerah dan memperkuat fiskal daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan kualitas transfer ke daerah, dan perluasan akses pembiayaan di daerah. Sementara itu, melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 027/1022/SJ dan No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi. Kebijakan yang diarahkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas pada perekonomian lokal. Ke depan, penerapan sistem keuangan daerah yang semakin terintegrasi, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan yang terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diperkirakan mendorong proses transaksi dan pelaporan keuangan di daerah secara lebih cepat dan efisien.

Tabel II.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

	APBN 2021	APBN 2022	PMK 17/2021	Realisasi		
TKDD (Triliun Rp)				% thp pagu s.d. Mar 2021	% thp pagu s.d. Mar 2022	Mar 2022 (yoy)
Transfer ke Daerah	723.5	492.3	708.5	22.9%	23.6%	2.0%
I. Dana Perimbangan	688.7	492.1	674.2	24.0%	24.5%	1.9%
A. Dana Transfer Umum	492.3	467.3	479.8	27.9%	27.7%	-0.3%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	102.0	102.0	102.0	29.4%	12.0%	-58.0%
2. Dana Alokasi Umum	390.3	365.3	377.8	27.5%	32.0%	16.4%
B. Dana Transfer Khusus	196.4	24.8	194.4	14.4%	16.6%	-
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.2	0.0	63.6	0.1%	0.1%	25.7%
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.2	24.8	130.8	21.4%	24.4%	12.4%
II. Dana Insentif Daerah	13.5	0.0	13.5	0.9%	4.2%	146.8%
III. Dana Otsus dan Keistimewaan	21.3	0.2	20.8	1.0%	0.9%	-
Dana Desa	72.0	7.2	72.0	14.7%	15.9%	2.1%
TKDD	795.5	499.5	780.5	22.2%	22.9%	2.09

Sumber: Kemenkeu, diolah

6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> UU HKPD mencakup pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah dan Sinergi Fiskal.

#### Kinerja Lapangan Usaha

#### Pertanian

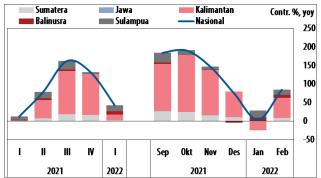
Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian di berbagai wilayah pada triwulan I 2022 diprakirakan membaik dari triwulan sebelumnya. Produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, khususnya di Sumatera, menopang perbaikan kinerja LU pertanian didorong peningkatan produktivitas lahan replanting yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Selain itu, kenaikan harga CPO global di tengah penurunan produksi soybean dan rapeseed dari Tiongkok dan Eropa turut menjadi insentif produksi bagi petani kelapa sawit. Kendati demikian, perbaikan produksi TBS kelapa sawit lebih lanjut tertahan perlambatan kinerja di Kalimantan dipengaruhi oleh kegiatan mudik petani dan musim trek yang masih berlanjut. Perbaikan juga ditopang subsektor tabama didorong produksi padi yang meningkat pada triwulan I 2022 seiring masuknya masa panen raya pada bulan Februari - Maret 2022, terutama di Jawa, Sumatera, dan Balinusra. Peningkatan produksi juga dialami subsektor hortikultura ditopang produksi aneka cabai yang juga memasuki panen raya pada bulan Februari - Maret 2022 di berbagai daerah sentra di Jawa. Di sisi lain, penurunan produksi perikanan di awal tahun diprakirakan menahan perbaikan LU pertanian lebih lanjut dipengaruhi oleh tingginya gelombang laut akibat fenomena La Nina sehingga mengganggu aktivitas produksi perikanan, terutama di Sulampua.

Kinerja LU Pertanian tahun 2022 diprakirakan membaik dari tahun sebelumnya meski lebih rendah dari prakiraan di tengah risiko dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Produksi TBS kelapa sawit pada tahun 2022 diprakirakan membaik didukung peningkatan produktivitas lahan replanting di tengah kenaikan harga CPO global, meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh pemupukan yang kurang optimal akibat kenaikan harga pupuk sebagai dampak tidak langsung konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, berakhirnya La Nina pada akhir triwulan II 2022 dan terbitnya peraturan baru<sup>3</sup> mengenai pemeliharaan ekosistem gambut berisiko menahan produktivitas lahan perkebunan sawit, khususnya di Sumatera. Sementara itu, kinerja tabama dan hortikultura diprakirakan membaik sejalan prakiraan sebelumnya didorong oleh program perluasan dan intensifikasi lahan tanam, penggunaan bibit unggul, dan peningkatan kapasitas SDM melalui penyuluhan tani. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif seiring menurunnya risiko La Nina

terutama memasuki semester II 2022 turut mendukung perbaikan kinerja tabama dan hortikultura, meski kenaikan harga pupuk berisiko menahan perbaikan lebih lanjut. Sementara itu, produksi perikanan diprakirakan sedikit melambat selama tahun 2022 dipengaruhi implementasi kebijakan pembatasan penangkapan ikan.

#### Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2022 diprakirakan melambat tetap tinggi, meski dibandingkan triwulan sebelumnya. Permintaan eksternal pada awal 2022 masih cukup tinggi untuk berbagai komoditas pertambangan nasional. Selain itu, kenaikan harga komoditas sebagai dampak peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang menahan pasokan dari Rusia, turut memberi insentif bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas produksi dan ekspor pada akhir triwulan I 2022. Meskipun demikian, beberapa kendala terkait produksi dan kebijakan prioritisasi pemenuhan kebutuhan domestik turut berdampak pada perlambatan kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2022, khususnya pertambangan berorientasi ekspor (Grafik II.5).



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.5. Nilai Ekspor Pertambangan Nonmigas

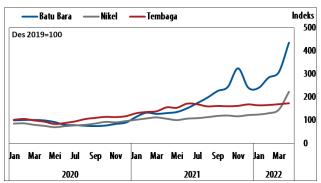
LU Pertambangan <u>Kalimantan</u> dan <u>Sumatera</u> diprakirakan tumbuh melambat akibat pengalihan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan domestik yang berlangsung sepanjang Januari 2022. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas produksi dan logistik beberapa korporasi terhenti sementara, seiring terbatasnya kapasitas *inventory* dan pengapalan batu bara. Namun, pengalihan ekspor tersebut telah direlaksasi pada Februari 2022 bagi korporasi-korporasi yang telah memenuhi kewajiban pemenuhan dalam negeri (*domestic market obligation* – DMO) sehingga mendorong perbaikan ekspor pertambangan di kedua wilayah. Di <u>Sulampua</u>, produksi nikel diprakirakan tetap tumbuh tinggi meski relatif melambat, seiring penambahan kapasitas produksi industri hilirisasi nikel yang masih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

terbatas pada awal 2022. Sejalan dengan kondisi tersebut, produksi dan ekspor tembaga diprakirakan turut melambat, terutama akibat penambahan kapasitas penambangan yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, kuota ekspor tembaga juga hampir habis dan baru diperbaharui pada Maret 2022. Di sisi lain, kinerja produksi dan ekspor tembaga di <u>Balinusra</u> diprakirakan tumbuh tinggi pada triwulan I 2022 didukung perbaikan kualitas dan peningkatan kapasitas produksi bijih tembaga, serta optimalisasi kuota ekspor pada periode tersebut.

Prospek kinerja LU Pertambangan pada 2022 diprakirakan tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya. Berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan harga berbagai komoditas pertambangan nasional naik tinggi pada awal triwulan II 2022 (Grafik II.6). Selain itu, potensi untuk mengisi pasar Rusia juga masih cukup terbuka untuk meningkatkan volume ekspor, meskipun diprakirakan relatif terbatas akibat karakteristik dan kemampuan produksi di dalam negeri. Di <u>Sumatera</u> dan <u>Kalimantan</u>, produksi batu bara keseluruhan 2022 diprakirakan lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya terutama akibat pengalihan ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik pada triwulan I 2022. Ke depan, produksi diprakirakan terus membaik, mengingat hingga Maret 2022 seluruh korporasi produsen batu bara sudah dapat melakukan ekspor. Sementara itu, peluang untuk mengisi pasar Rusia juga masih cukup terbuka, terutama dari Kalimantan yang memiliki karakteristik produk lebih mirip dengan Rusia. Regulasi dan pengawasan terkait DMO perlu terus diperkuat agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi di tengah upaya untuk menjaga pertumbuhan ekspor sepanjang 2022. Di Sulampua, pertumbuhan produksi tembaga diprakirakan relatif terbatas dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Selain itu, kuota ekspor tembaga pada 2022 juga tidak mengalami peningkatan. Di sisi lain, produksi nikel diprakirakan tetap kuat untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi industri hilirisasi nikel yang cukup signifikan pada semester II 2022. Potensi pasar Rusia juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor, sehingga dibutuhkan dukungan fasilitasi dari berbagai lembaga terkait mengoptimalkan peluang tersebut. Sementara itu di Balinusra, kapasitas produksi tembaga naik cukup signifikan sejak awal 2022, setelah terkendala terbatasnya kapasitas penambangan dan turunnya kualitas produksi sepanjang 2021. Kuota ekspor juga meningkat, sehingga peningkatan produksi dapat didorong untuk mengisi pasar Rusia, khususnya ke Tiongkok.

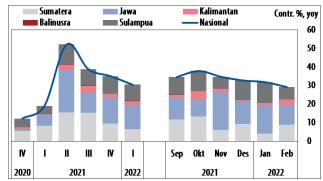


Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik II.6. Harga Acuan Komoditas Pertambangan

#### Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2022 diprakirakan tetap kuat didukung permintaan domestik, meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan kasus COVID-19 pada Februari 2022 sempat menahan permintaan berbagai subLU Industri Pengolahan berorientasi domestik. Namun, penurunan kasus COVID-19 secara cepat serta dukungan kebijakan Pemerintah menjaga permintaan domestik tetap tinggi. Kondisi tersebut terkonfirmasi pula dari purchasing manager's index (PMI) triwulan I 2022 yang tetap berada pada fase ekspansi meskipun sedikit menurun<sup>4</sup>. Di sisi lain, permintaan eksternal dari mitra dagang utama melambat sehingga menahan pertumbuhan ekspor di berbagai wilayah sampai dengan Februari 2022 (Grafik II.7).



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.7. Ekspor Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan di <u>Jawa</u> diprakirakan tetap tumbuh positif meski melambat sejalan dengan moderasi permintaan domestik dan ekspor. Perlambatan kinerja tersebut dipengaruh penurunan kinerja industri utama Jawa seperti industri otomotif dan alas kaki. Produksi otomotif baik motor maupun mobil diprakirakan tetap tumbuh tinggi, namun relatif lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, perlambatan permintaan AS diprakirakan menahan pertumbuhan ekspor TPT dan alas kaki. Kenaikan harga bahan baku sebagai dampak konflik

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sumber: IHS Markit

Rusia-Ukraina juga menekan kinerja industri makanan pada akhir triwulan I 2022. Meskipun demikian, berbagai kebijakan Pemerintah dalam mendorong permintaan domestik, termasuk perpanjangan insentif PPnBM untuk LCGC, mendorong terjaganya pertumbuhan pada triwulan I 2022. Dimulainya produksi kendaraan listrik di Jawa Barat juga menopang kinerja LU Industri Pengolahan tetap tumbuh kuat. Sementara itu, pertumbuhan industri berbasis kelapa sawit di <u>Sumatera</u> dan <u>Kalimantan</u> relatif membaik di tengah moderasi permintaan eksternal. Selain akibat dampak rendahnya produksi pada triwulan I 2021, produksi tetap tumbuh kuat untuk menopang perbaikan permintaan dalam negeri baik pangan maupun biodiesel. Kinerja industri alumina di Kalimantan juga membaik didukung peningkatan kapasitas produksi smelter pada triwulan I 2022. Selain itu, peningkatan harga timah global diprakirakan dapat mendorong peningkatan produksi timah. Di sisi lain, moderasi permintaan AS dan Singapura diprakirakan menahan kinerja ekspor industri elektronik di Sumatera. Di Sulampua, kinerja industri berbasis nikel diprakirakan melambat pada triwulan I 2022 sejalan dengan perlambatan permintaan Tiongkok, serta penambahan kapasitas yang lebih rendah. Sama halnya dengan industri di Jawa, kenaikan harga bahan baku juga berdampak pada kinerja industri makanan di Sulampua pada akhir triwulan I 2022.

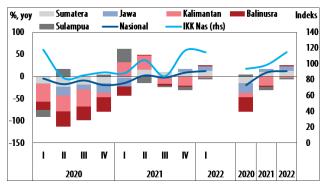
Moderasi permintaan global dan naiknya tekanan harga diprakirakan mengakibatkan kinerja LU Industri 2022 tumbuh lebih Pengolahan pada rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya, di tengah risiko berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Peningkatan tensi geopolitik global serta pembatasan aktivitas yang cukup ketat di Tiongkok berpotensi menekan permintaan global. Tekanan harga, baik dari dalam negeri maupun komoditas internasional, diprakirakan turut menahan kinerja LU Industri Pengolahan ke depan. Meskipun demikian, prospek perbaikan permintaan domestik tetap mendorong kinerja produksi, didukung kebijakan Pemerintah baik melalui sejumlah insentif fiskal yang masih berlanjut maupun pelonggaran mobilitas pada HBKN Idul Fitri 2022. Di Jawa, berlanjutnya moderasi permintaan AS diprakirakan menahan perbaikan kinerja industri TPT dan alas kaki ke depan. Selain itu, tekanan harga bahan baku industri makanan diprakirakan masih berlanjut dalam jangka waktu pendek. Di sisi lain, kinerja industri otomotif diprakirakan masih tetap kuat sejalan dengan perbaikan permintaan yang ditopang berlanjutnya insentif PPnBM LCGC hingga September 2022. Potensi risiko disrupsi suplai global akibat konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada ketersediaan semikonduktor otomotif juga perlu mendapat perhatian, meski komposisi penggunaan semikonduktor di Indonesia relatif tidak setinggi negara lain. Di Sumatera, kinerja

industri berbasis kelapa sawit akan membaik ditopang permintaan domestik di tengah moderasi permintaan ekspor. Industri pulp dan kertas juga diprakirakan tetap kuat untuk menopang permintaan global dan domestik, sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat. Di sisi lain, sejalan dengan Sumatera, industri berbasis kelapa sawit di Kalimantan juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, didukung kenaikan produksi bahan baku khususnya pada semester II 2022 serta permintaan domestik yang tetap kuat. Industri alumina diprakirakan melanjutkan tren positif sejak triwulan I 2022 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan. Sementara itu di Sulampua, naiknya kapasitas produksi hilirisasi nikel pada semester II 2022 diprakirakan mendorong kinerja Industri Pengolahan tetap kuat ke depan. Peningkatan harga nikel serta potensi pasar Rusia dapat dioptimalkan untuk mendorong ekspor lebih lanjut. Di sisi lain, tekanan harga pada bahan baku industri makanan diprakirakan menahan perbaikan lebih lanjut.

#### Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2022 diprakirakan sedikit melambat seiring dengan normalisasi permintaan setelah periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta faktor penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron. Peningkatan level PPKM akibat merebaknya kasus varian Omicron menahan mobilitas masyarakat pada awal tahun 2022. Namun kasus Covid-19 yang berangsur menurun sejak akhir Februari 2022 yang mendorong perbaikan mobilitas sehingga permintaan masyarakat masih kuat sebagaimana terlihat pada indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen (Grafik II.8). Kinerja aktivitas perdagangan juga sejalan dengan perkembangan LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh meningkat ditopang oleh perbaikan pada kinerja angkutan barang domestik. Lebih lanjut, dukungan relaksasi PPnBM DTP diperkirakan turut menyangga penjualan otomotif pada triwulan I 2022 meski dengan besaran insentif yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan 2022, kinerja LU Perdagangan diprakirakan tetap tumbuh tinggi meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya. Menguatnya permintaan domestik seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat, termasuk dengan diperbolehkannya mudik Lebaran 2022 oleh Pemerintah, serta meningkatnya capaian vaksinasi nasional yang didukung program booster diprakirakan mendukung capaian kinerja LU Perdagangan pada 2022. Meski demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh potensi tekanan inflasi yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 serta kenaikan harga energi dan pangan diperkirakan global. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan, termasuk pada penjualan otomotif dan ritel. Selain itu, tantangan terkait dengan efisiensi logistik nasional seiring distribusi dan transportasi barang yang belum optimal dapat menahan capaian kinerja LU Perdagangan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.8. Penjualan Eceran dan Indeks Keyakinan Konsumen

# Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

LU Akmamin diprakirakan tumbuh positif didukung sejumlah pelonggaran restriksi pada triwulan I 2022. Perbaikan LU Akmamin di seluruh wilayah sempat tertahan oleh penyebaran COVID-19 varian Omicron yang menahan perbaikan mobilitas serta tingkat okupansi hotel di sejumlah kota besar pada awal tahun 2022. Namun pelonggaran restriksi yang dilakukan secara bertahap sejalan dengan menurunnya kasus COVID-19 diprakirakan mengangkat kinerja LU Akmamin pada akhir triwulan I 2022. Hal ini terindikasi dari perbaikan mobilitas masyarakat, peningkatan kedatangan domestik di bandara destinasi wisata, dan perbaikan tingkat okupansi hotel di sejumlah kota besar. Perbaikan kinerja LU Akmamin juga ditopang oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) seiring dengan berbagai penyelenggaraan berbagai event internasional, antara lain rangkaian agenda G20 di Jawa-Bali dan MotoGP Mandalika. Kondisi tersebut turut didukung oleh pemberlakuan sejumlah kebijakan pelonggaran dan pembukaan akses bagi wisman secara bertahap, termasuk kebijakan travel bubble diberlakukan di beberapa destinasi wisata.

Kinerja LU Akmamin pada 2022 diprakirakan masih kuat ditopang oleh pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisman, meskipun tidak setinggi prakiraan sebelumnya. Pelonggaran mobilitas wisnus yang disertai dengan penerapan protokol kesehatan dan perluasan vaksinasi di tengah membaiknya permintaan masyarakat akan aktivitas wisata berperan penting dalam mendorong perbaikan LU Akmamin di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, pelonggaran akses wisman melalui kebijakan Visa on Arrival (VOA) dan bebas karantina bagi wisman juga diperkirakan turut menopang perbaikan LU

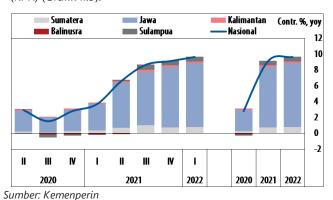
Akmamin ke depan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh negara *peers*. Lebih lanjut, berbagai perhelatan internasional yang akan dilangsungkan sepanjang 2022, diiringi dengan kondisi pandemi yang kian membaik, diperkirakan memberikan dampak positif pada capaian kinerja LU Akmamin pada 2022. Kendati demikian, kenaikan harga energi, termasuk avtur, dan pangan, serta potensi penyebaran varian COVID-19 terbaru dapat menahan perbaikan secara lebih lanjut. Ke depan, pembukaan akses wisman secara aman didukung strategi promosi perlu dioptimalkan disertai upaya mendorong momentum peningkatan wisnus untuk meningkatkan prospek kinerja LU Akmamin.

#### Konstruksi

Pada triwulan I 2022 kinerja LU Konstruksi tumbuh positif meski diprakirakan melambat dari triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut sebagaimana pola musimannya, seiring proyek-proyek baru Pemerintah yang masih dalam tahap administrasi awal. Kondisi ini terkonfirmasi dari realisasi fisik infrastruktur jalan dan sumber daya air yang masih rendah terhadap pagu anggarannya dalam dua bulan pertama pada 2022. Selain itu, sejumlah proyek telah memasuki tahap akhir sehingga aktivitas konstruksi menurun seperti sejumlah bendungan dan jalan tol Manado-Bitung di Sulampua. Beberapa proyek swasta juga mengalami kendala dalam pengerjaannya, seperti pembangunan pabrik kimia dan proyek properti di Jawa. Namun kinerja LU masih dapat tumbuh positif ditopang pembangunan proyek multiyears lain yang masih terus berlanjut seperti sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V dan Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan, serta proyek pembangunan 8 (delapan) bendungan dan Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP) di Balinusra.

Kinerja LU Konstruksi pada 2022 diprakirakan meningkat meski tidak setinggi prakiraan seiring masih tertahannya pembangunan infrastruktur pemerintah maupun swasta. Kendala pembangunan berdampak pada penangguhan sejumlah proyek di daerah termasuk proyek strategis nasional. Jumlah proyek strategis nasional yang diprakirakan selesai pada 2022 sebesar 30 proyek, sedikit menurun dari prakiraan sebelumnya sebesar 31 proyek. Selain itu, permintaan akan hunian dan perkantoran yang masih lemah turut menahan aktivitas konstruksi swasta. Okupansi perkantoran di *Central Business District* (CBD) yang diperkirakan masih menurun dan permintaan akan high-rise residential yang juga terbatas pada 2022 menahan

pembangunan proyek properti lebih lanjut<sup>5</sup>. Meski demikian, berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur di daerah, termasuk peningkatan penyelesaian proyek strategis nasional dari 24 proyek pada 2021 menjadi 30 proyek pada 2022, diperkirakan menopang kinerja LU Konstruksi. <u>Di Jawa</u>, aktivitas konstruksi didukung berlanjutnya pengerjaan sejumlah proyek di sektor transportasi. Di Sumatera, terutama didorong berlanjutnya pembangunan JTTS, kawasan sport centre di Sumut dan pengembangan food estate. Di Kalimantan, terutama ditopang oleh mulai bergeraknya aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, termasuk Bendungan Sepaku Semoi. Selain itu, terdapat pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kaltara serta proyek smelter baterai dan nikel di Kalsel. Di Sulampua didukung berlanjutnya pembangunan sejumlah bendungan, irigasi, serta smelter nikel dan pasir besi. Di Balinusra, didorong pembangunan proyek smelter dan fasilitas pengolahan tembaga di NTB dan pengembangan tahap I KEK Kesehatan di Bali. Di samping itu, kinerja konstruksi juga diperkirakan ditopang oleh berlanjutnya kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti sebesar 50% dari insentif tahun 2021 hingga September 2022, serta berlanjutnya kebijakan pelonggaran LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti sampai dengan Desember 2022 yang tercermin pada peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Grafik II.9).

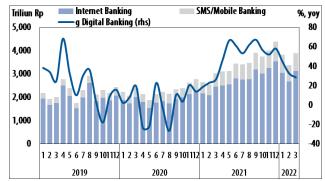


Grafik II.9. Perkembangan KPR

### Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang tercermin dari transaksi ekonomi dan keuangan digital yang menunjukkan perkembangan pesat. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking (Grafik II.10). Di sisi nontunai, nilai

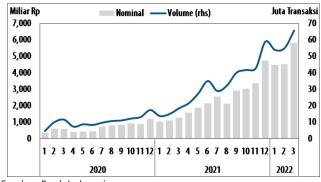
transaksi uang elektronik (UE) pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh 36,7% (yoy). Nilai transaksi *digital banking* pada triwulan I 2022 meningkat 34,9% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.10. Transaksi Digital Banking

Indonesia mendorong terus inovasi pembayaran termasuk dalam rangka mendukung program pemerintah dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang inklusif dan efisien melalui kebijakan sistem pembayaran nontunai. Bank Indonesia terus melanjutkan upaya perluasan layanan BI-FAST melalui mobile banking serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui elektronifikasi bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank Indonesia terus bersinergi dengan asosiasi, serta Kementerian/Lembaga terkait melanjutkan akselerasi peningkatan transaksi dan perluasan merchant QRIS, yang secara volume dan nominal terus meningkat sampai dengan akhir triwulan I 2022 (Grafik II.11).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.11. Transaksi QRIS

Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan I 2022 meningkat 13,6% (yoy). Transaksi nilai kecil melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2021 secara nominal tercatat tumbuh 12,1%

\_

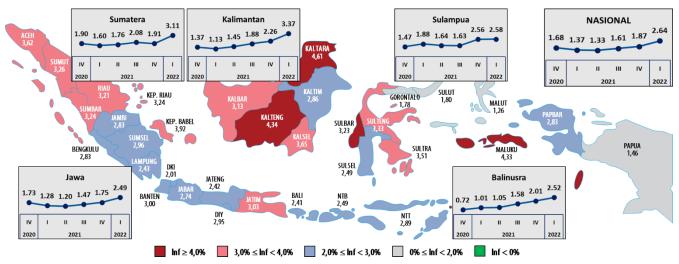
<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sumber: Jones Lang LaSalle Research Report, 2022

(yoy). Sementara itu, nominal transaksi nilai besar melalui Sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh 30,7% (yoy).

Bank Indonesia terus memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui implementasi digitalisasi layanan kas keliling (PINTAR), menjaga ketersediaan uang tunai, termasuk tambahan penyediaan uang selama periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443 H serta memperkuat kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### Inflasi Daerah

Inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I 2022 meningkat, meski masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,64% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2021 sebesar 1,87% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dengan capaian inflasi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan dan Sumatera masing-masing sebesar 3,37% (yoy) dan 3,11% (yoy). Meskipun demikian, secara keseluruhan realisasi inflasi di seluruh wilayah terkendali dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 3,0±1,0%. Capaian inflasi pada triwulan I 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi pada seluruh kelompok disagregasinya, khususnya inflasi inti dan administered prices (AP) yang terjadi di seluruh wilayah. Di sisi lain, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, dengan yang tertinggi di Kalimantan Utara (4,61% yoy) dan terendah di Maluku Utara (1,26% yoy), yang antara lain disebabkan oleh kendala struktural dalam pola produksi dan kelancaran distribusi.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.2. Peta Inflasi Daerah Triwulan I 2022 (%yoy)

Inflasi kelompok inti meningkat seiring permintaan domestik yang membaik di semua wilayah didukung kebijakan pelonggaran mobilitas, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Meski demikian, capaian inflasi inti di berbagai wilayah masih terkendali ditopang oleh stabilitas nilai tukar yang terjaga sesuai dengan fundamentalnya dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga sewa dan kontrak rumah, khususnya di wilayah Sumatera dan Balinusra, seiring perbaikan mobilitas masyarakat dan diberlakukannya Pertemuan Tatap Muka (PTM) untuk sekolah dan perkuliahan di berbagai daerah. Selain itu, harga emas perhiasan naik di semua wilayah sejalan dengan tren kenaikan harga emas global akibat meningkatnya ketidakpastian global yang antara lain dipengaruhi berlanjutnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina selama periode laporan.

Realisasi inflasi *volatile foods* (VF) juga meningkat khususnya di Sumatera, sementara realisasi inflasi VF di wilayah Jawa tercatat stabil dan melambat di wilayah lainnya.

Inflasi VF secara nasional lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya terutama didorong oleh wilayah Sumatera, sementara realisasi VF di Jawa stabil dan wilayah lainnya melambat. Berdasarkan komoditasnya, lebih tingginya inflasi VF tersebut terutama disumbang oleh berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak goreng yang terjadi di semua wilayah. Komoditas minyak goreng kembali mengalami inflasi pasca pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan di tengah masih tingginya harga CPO global. Lebih lanjut, kenaikan harga komoditas VF lainnya didorong oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke harga impor dan biaya produksi antara lain harga pakan ternak. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga daging ayam di semua wilayah, telur ayam ras di Sumtera dan Jawa, serta daging sapi di Sumatera, Jawa, dan Balinusra. Di samping itu, kenaikan harga

komoditas VF juga dipengaruhi oleh faktor musiman akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Meski demikian, tekanan inflasi VF yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi komoditas aneka cabai ditopang oleh meningkatnya pasokan pada akhir triwulan I 2022 seiring masuknya masa panen di beberapa sentra produksi, antara lain Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Inflasi kelompok AP meningkat di semua wilayah. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan harga energi nonsubsidi (Pertamax Turbo, Dexlite, Pertadex, dan LPG nonsubsidi) yang merata di semua wilayah seiring dengan peningkatan dinamika harga komoditas global. Kenaikan harga minyak dunia didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kondisi geopolitik khususnya Rusia – Ukraina serta pasokan global yang belum dapat mengimbangi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi global. Selain itu, peningkatan inflasi AP didorong oleh inflasi tarif angkutan udara di mayoritas wilayah akibat meningkatnya mobilitas udara pascapelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan kenaikan permintaan menjelang HBKN Idulfitri. Komoditas aneka rokok juga menyumbang kenaikan inflasi AP secara merata di semua wilayah yang dipengaruhi oleh berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau oleh produsen.

Ke depan, inflasi tahun 2022 diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0%±1,0%. Prakiraan tersebut sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mewaspadai sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk penguatan

implementasi strategi pengendalian inflasi 4K, guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Koordinasi dengan Pemerintah tersebut juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443H.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 9 Maret 2022. Langkah strategis ditujukan untuk secara konsisten menjaga inflasi 2022 dalam kisaran sasaran 3,0%±1% dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup:

- a. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional;
- Memitigasi dampak upside risks, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat;
- c. Menjaga inflasi kelompok VF dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah;
- d. Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat;
- e. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: "Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga".

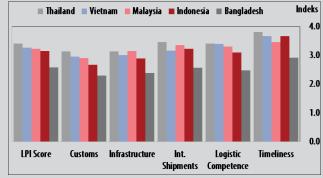
# Digitalisasi Logistik dalam Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Antardaerah

Prospek perbaikan permintaan domestik didukung oleh kelancaran distribusi pasokan dari pusat produksi di berbagai daerah. Struktur produksi nasional saat ini belum merata di seluruh provinsi, dengan provinsiprovinsi di Pulau Jawa berperan besar dalam memasok berbagai komoditas yang diperdagangkan antardaerah. Kondisi tersebut tercermin pada neraca perdagangan antardaerah (Grafik II.12), di mana sebagian besar provinsi mengalami defisit. Sementara itu, pemerataan faktor-faktor produksi membutuhkan upaya bersama serta tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek, sehingga efisiensi logistik perdagangan antardaerah berperan penting dalam memastikan permintaan dari berbagai daerah dapat dipenuhi dengan biaya rendah. Hal tersebut juga penting untuk mendukung pesatnya perkembangan transaksi ecommerce ke depan, yang saat ini masih terpusat di Jawa.



Sumber: BPS, 2021 Keterangan: angka dalam triliun Rupiah **Grafik II.12.** Neraca Perdagangan Antardaerah

Masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Menurut World Bank (2018), Logistics Performance Index Indonesia belum sekuat negara-negara di ASEAN, terutama Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam (Grafik II.13). Kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan besar. Penguatan kinerja nasional masih terus dilanjutkan melalui pembangunan infastruktur konektivitas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu upaya lain yang dapat terus logistik. didorona adalah digitalisasi Pesatnya perkembangan digitalisasi selama pandemi mendorong peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi, konsumsi, maupun logistik yang menghubungkan keduanya. Digitalisasi logistik sendiri dapat meningkatkan efektivitas layanan sehingga menurunkan *lost sales*, serta menurunkan biaya dalam berbagai aktivitas logistik<sup>6</sup>.



Sumber: World Bank, 2018

Grafik II.13. Logistics Performance Index Negara ASEAN

Salah satu upaya Pemerintah terkait digitalisasi logistik adalah implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sejak akhir 20207. NLE merupakan salah satu inovasi Pemerintah untuk solusi penguatan layanan logistik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Hingga Maret 2022, NLE telah diimplementasikan setidaknya di 18 pelabuhan nasional (Ditjen Bea Cukai, 2022). Implementasi NLE dapat mendorong peningkatan efisiensi logistik, baik dalam aktivitas ekspor-impor maupun perdagangan antardaerah. Bagi pelaku usaha, pemanfaatan NLE dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Bagi Pemerintah, big data yang tersimpan pada NLE dapat dimanfaatkan untuk analisis pendukung kebijakan logistik dan/atau perdagangan regional. Partisipasi pelaku usaha logistik sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut, khususnya melalui implementasi Permendag 92 tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau. Dalam perdagangan antarpulau, pemilik barang diwajibkan melengkapi dokumen Daftar Muatan Antarpulau yang dilaporkan secara elektronik melalui Indonesia National Single Window (INSW), yang terintegrasi dengan NLE. Selain itu, kolaborasi platform jasa penyedia logistik dengan NLE juga perlu terus didorong, antara lain melalui fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sumber: McKinsey (2017). Implementasi *supply chain 4.0* dapat menurunkan *lost sales* hingga 65%-75%, biaya transportasi & pergudangan 15%-30%, biaya administrasi 50%-80%, serta *inventory* 35%-70%.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Untuk mendukung implementasi NLE, diterbitkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

# Pengembangan Solar Photovoltaic (Solar PV) untuk Mendukung Akselerasi Transisi Energi Hijau

Akselerasi transisi energi hijau membutuhkan upaya bersama untuk mencapai target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Semakin kompleksnya isu lingkungan, tidak hanya bersumber dari ekstraksi sumber daya, namun juga pemanfaatan energi di tengah dampak pandemi COVID-19 dan ketegangan politik global, mendorong perlunya percepatan pencapaian low carbon emission. Indonesia sebagai produsen energi dan penghasil emisi gas rumah kaca berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dengan usaha sendiri) atau 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030 sebagaimana target The Paris Climate Agreement. Di sisi lain, kebutuhan energi dalam negeri terus meningkat. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia telah memiliki RUEN sebagai panduan pengelolaan secara menyeluruh agar ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat terwujud<sup>8</sup>. Sampai dengan 2021, realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional masih dapat ditingkatkan.



Sumber: Kementerian ESDM.

Grafik II.14. Capaian Bauran Energi Nasional

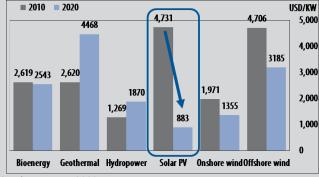
Untuk itu, akselerasi transisi energi diperlukan untuk mencapai target dan mengejar ketertinggalan dari *peers*. Tahap pertama yang dapat dilakukan adalah dibutuhkannya dukungan Pemda dalam pengesahan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang saat ini baru mencapai 22 provinsi.

Potensi pengembangan solar *photovoltaic* (PV) sebagai EBT di Indonesia cukup besar. Solar PV merupakan salah satu sumber energi potensial yang dapat dikembangkan sebagai EBT untuk menghasilkan energi listrik dalam rangka mendukung capaian *net zero emission* dan mencapai target RUEN. Perkembangan terkini menunjukkan harga solar PV

terus turun, terendah dibandingkan energi terbarukan lainnya. Potensi pengembangan di Indonesia sangat besar terutama dari ketersediaan lahan khususnya untuk pembangunan pembangkit listrik surya (PLTS). Dibandingkan dengan negara *peers* di ASEAN seperti Thailand (2,9 GW) dan Malaysia (881 MW), kapasitas terpasang pembangkit solar PV Indonesia (181 MW) masih dapat ditingkatkan.



Sumber: Dewan Energi Nasional, data per Maret 2022.
Keterangan: Propemperda: Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Grafik II.15. Progress Penetapan Rencana Umum Energi Daerah
(RUED)



Sumber: IRENA, 2020

Grafik II.16. Harga/MW Energi Terbarukan

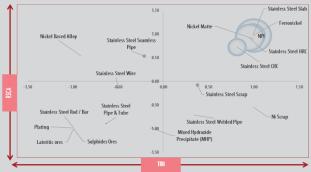
Investasi Solar PV perlu terus didorong untuk mencapai target bauran energi solar PV. Potensi investasi masih terbuka untuk terus didorong dan saat ini terdapat sejumlah pipeline project Solar PV di sejumlah wilayah<sup>9</sup>. Salah satu proyek solar PV tersebut bahkan memiliki potensi ekspor yaitu di Sumatera (Kepri) yang termasuk untuk ekspor listrik ke Singapura. Ke depan, upaya pengembangan industri teknologi EBT dalam negeri, khususnya panel surya, untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pembangkit EBT dapat terus ditingkatkan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Definisi Dewan Energi Nasional

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> IESR, 2022

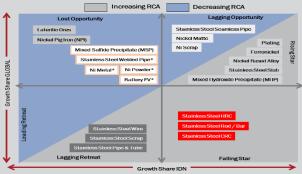
### Ketahanan Cadangan Nikel dalam Mendukung Penguatan Struktur Industri Nasional

Hilirisasi nikel berperan strategis dalam penguatan struktur industri nasional. Penguatan tersebut didukung oleh daya saing ekspor produk hilirisasi nikel yang relatif unggul secara global. Hal ini akan menjadi momentum yang baik seiring dengan perkiraan permintaan yang masih sangat prospektif, baik pada produk stainless steel maupun produk ramah lingkungan seperti EV dan produk energi hijau yang akan memerlukan sejumlah bahan baku logam strategis, termasuk nikel.



Sumber: WITS, diolah

**Grafik II.17.** Pemetaan Daya Saing Produk Hilirisasi Nikel Indonesia



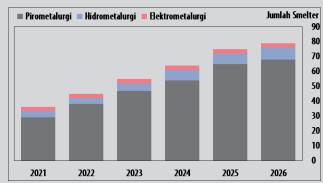
Sumber: WITS, diolah

**Grafik II.18.** Pemetaan Kesesuaian Ekspor Hilirisasi Nikel Indonesia dengan Permintaan Global

Pengembangan rantai industri hilirisasi nikel masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk di antaranya risiko ketahanan cadangan nikel nasional.

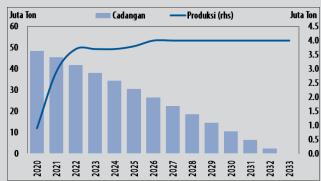
Potensi tinggi permintaan nikel telah mendorong investasi asing masuk ke sektor hilirisasi nikel khususnya dalam pembangunan smelter. Data terkini menunjukkan setidaknya terdapat 36 smelter nikel yang telah beroperasi dan diprakirakan akan terus bertambah hingga tahun 2026. Jika tidak terdapat eksplorasi baru, cadangan nikel nasional yang saat ini berada pada kisaran 50 juta ton akan habis

pada tahun 2033. Dengan kondisi tersebut, momentum prospek permintaan produk hilirisasi nikel dalam jangka panjang berisiko tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.



Sumber: Kemenko Marves, diolah

Grafik II.19. Perkiraan Jumlah Smelter Nikel di Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenko Marves, diolah

Grafik II.20. Perkiraan Produksi dan Cadangan Nikel Indonesia

#### Selain itu, pengembangan rantai industri hilirisasi nikel juga masih dihadapkan pada sejumlah kendala utama.

Dari sisi produksi (P1), beberapa mata rantai nilai belum berkembang dengan optimal. Struktur industri nikel saat ini memperlihatkan bahwa peningkatan nilai tambah masih minim dan terpusat pada rantai industri stainless steel. Sementara itu, perkembangan rantai industri baterai electric vehicle (EV) masih terbatas akibat ekosistem EV domestik belum berkembang, termasuk di antaranya infrastruktur pendukung. Dari sisi pengaturan dan kelembagaan (P2), kebijakan pendukung ekosistem energi terbarukan yang masih terbatas, baik di sisi ritel maupun industri menjadi kendala utama yang masih dihadapi. Selain kebijakan tarif mendukung impor belum pengembangan industri hilir. Dari sisi promosi dan akses pasar (P3), skema afiliasi ini masih menghambat pengembangan hilirisasi nikel nasional.

#### **BAGIAN 3**

# Isu Strategis: Sinergi dan Percepatan Implementasi Digitalisasi Pembayaran dalam Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pemulihan Ekonomi Nasional

#### Latar Belakang

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD) telah difokuskan pada 3 (tiga) area utama, yaitu digitalisasi integrasi Bansos (G2P 4.0), Transaksi Pemerintah Daerah (melalui P2DD), dan Transportasi, dengan pemanfaatan skema Mobility as a Service (MaaS) dan Account Based Ticketing (ABT) dalam integrasi moda transportasi. Sinergi dan percepatan implementasi digitalisasi pembayaran pada ketiga area utama diarahkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui perluasan akses keuangan, peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, penerapan tata kelola, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan keuangan pemerintah untuk kesehatan fiskal.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pembayaran pada 3 (tiga) area tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yang secara umum berkaitan dengan kesiapan Pemda, kondisi ekosistem digital, ketersediaan data, kondisi infrastruktur, inefisiensi layanan publik, keberlangsungan model bisnis dan kompleksitas proses business to business (B2B). Di sisi lain, peluang untuk mengakselerasi implementasi digitalisasi pembayaran semakin terbuka, sejalan dengan penguatan kelembagaan, yang didukung dengan keberadaan program digitalisasi dari Kementerian/Lembaga (K/L), forum koordinasi di tingkat nasional dan komitmen Pemda. Di samping itu, perkembangan inovasi digital yang dilakukan industri juga telah didukung dengan standarisasi sistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, sehingga turut mendorong percepatan digitalisasi berbagai transaksi pembayaran. Upaya digitalisasi ini semakin terakselerasi karena kondisi pandemi yang mendorong masyarakat semakin melek digital dengan meningkatnya pemanfaatan digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi pembayaran.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan dan isu strategis dalam implementasi digitalisasi pembayaran di ketiga area, dilakukan asesmen menyeluruh dengan pendekatan 3I+2K, yang mencakup aspek Informasi dan Data, Infrastruktur, Implementasi, Koordinasi, serta Ketentuan. Hasil asemen 3I+2K tersebut menjadi referensi dalam penyusunan

rekomendasi rencana aksi serta substansi koordinasi dalam jangka pendek – menengah pada ketiga area program, yang antara lain mencakup (1) perluasan digitalisasi pembayaran (G2P 4.0); (2) pusat data yang terintegrasi; (3) pelaksanaan program kerja P2DD (IETPD, *Championship* dan Rakornas); (4) integrasi moda transportasi; serta (5) implementasi MLFF.

#### Perkembangan Program Digitalisasi

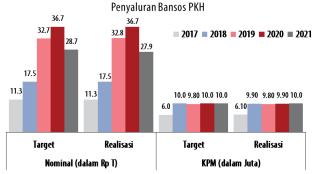
Pada fase awal, kebijakan digitalisasi pembayaran pada ketiga program Pemerintah tahun 2020 difokuskan untuk membangun *awareness* dan inovasi. Fokus kebijakan pada tahun 2021 kemudian ditingkatkan dengan penguatan kelembagaan dan regulasi serta standarisasi SP. Pada tahun 2022, percepatan digitalisasi ini dilakukan dengan fokus pada inklusivitas dan kompetisi yang akan diperkokoh dengan Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital.

#### Digitaliasi Bantuan Sosial

Mekanisme penyaluran bansos di Indonesia telah melalui berbagai transformasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyaluran Perkembangan teknologi memiliki peran penting dan menjadi kunci di setiap transformasi penyaluran bansos, yang pada awalnya dimulai secara tunai (G2P 1.0) dan kemudian bertransformasi menjadi penyaluran secara non tunai (G2P 2.0). Pada fase G2P 2.0, penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan kartu dengan skema satu kartu untuk penyaluran satu jenis bantuan, yang selanjutnya berkembang menjadi satu kartu untuk berbagai jenis bantuan (G2P 3.0). Meski demikian, terdapat perubahan mekanisme penyaluran Program Sembako khusus bulan Januari s.d Maret 2022, yang disalurkan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia. Perubahan mekanisme tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penyaluran untuk mengantisipasi dampak perkembangan kondisi global terhadap kemampuan dan daya beli masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial.

Sejak bertransformasi menjadi non tunai, secara umum penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai target setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari tingkat persentase penyaluran terhadap target serta persentase pemanfaatan terhadap penyaluran bansos PKH

dan Program Sembako yang telah berada di atas 90% bahkan mendekati 100% sejak 2017. Pada Triwulan I – 2022, realisasi penyaluran bantuan PKH Tahap I tercatat sebesar 25,26% dari target Rp28,7 triliun, sementara penyaluran Sembako telah direalisasikan sebesar 24% dari target sebesar Rp45,12 triliun.



**Grafik III.1.** Perkembangan penyaluran bansos PKH tahun 2017-2021



**Grafik III.2.** Perkembangan penyaluran bansos sembako tahun 2017-2021

Saat ini, BI bersama Tim Pengendali Bansos Non Tunai (BSNT) tengah mempersiapkan transformasi digital penyaluran bansos (G2P 4.0). Digitalisasi bansos telah diamanatkan oleh Presiden dalam rapat terbatas pada 26 April 2016 dan menjadi fokus nasional dalam reformasi perlindungan sosial. Potensi implementasi digitalisasi bansos juga didukung beberapa indikator, antara lain kepemilikan rekening oleh 15,2 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penyaluran bansos, kepemilikan NIK penduduk Indonesia yang mencapai 94% (SUSENAS, 2018), kepemilikan ponsel oleh 77% orang dewasa serta pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 130 milyar dolar AS pada tahun 2025.

Sebagai langkah awal transformasi digitalisasi bansos, telah dilakukan inisiasi melalui perumusan model bisnis, persiapan dan pelaksanaan uji coba pertama oleh BI bersama Tim Pengendali BSNT pada tahun 2021. Berdasarkan model bisnis yang diusulkan BI dan disepakati Tim Pengendali BSNT, terdapat 4 (empat) prinsip utama yang menjadi target digitalisasi bansos, yaitu 1) bersifat customer centric atau memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada KPM baik dalam proses penyaluran

maupun pemanfaatan bantuan; 2) omnichannel atau menyediakan berbagai pilihan instrumen dan kanal pembayaran sesuai kondisi dan kebutuhan KPM; 3) tersedianya sistem pembayaran yang interkoneksi dan interoperable, serta 4) pemanfaatan pusat data terintegrasi atau central mapper. Keempat hal tersebut memiliki dimensi aspek yang sangat luas dan perlu persiapan yang sangat matang dalam implementasinya. Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun 2021, Tim Pengendali BSNT melakukan persiapan intensif untuk uji coba digitalisasi bansos.

Uji coba digitalisasi bansos pertama telah berhasil dilaksanakan pada November s.d Desember 2021 kepada ±2.000 KPM yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah, yaitu Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Barat, dan Papua. Mekanisme penyaluran pada uji coba digitalisasi bansos menggunakan moda transaksi QRIS, Biometrik dan USSD, serta dilaksanakan bersama dengan HIMBARA, LinkAja dan Pos Indonesia sebagai penyalur. Berdasarkan hasil monitoring Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), tingkat keberhasilan uji coba, khususnya pada aspek SP, mencapai hampir 100%. Namun demikian, masih terdapat kendala yang secara umum bersumber dari luar sistem, seperti data yang tidak clean and clear, nomor ponsel tidak valid, kualitas sinyal kurang memadai, perangkat ponsel yang tidak mendukung, keterbatasan pasokan LPG, dan ketidakhadiran KPM.

Berdasarkan hasil uji coba, digitalisasi bansos memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi KPM, digitalisasi bansos yang mengedepankan aspek customer centric memungkinkan KPM untuk memantau saldo bantuan secara mandiri, memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan, serta meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan. Bagi Pemerintah, digitalisasi bansos dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran pemanfaatan dana bantuan, mempermudah monitoring serta penyelesaian kendala secara terpadu. Bagi agen/merchant, digitalisasi bansos mempermudah pemantauan transaksi dan stok barang melalui aplikasi Point of Sales (PoS) dan meningkatkan aktivitas jual beli. Sementara bagi penyalur, digitalisasi bansos mendorong pengembangan sistem interkoneksi dan interoperable, meningkatkan efisiensi anggaran dan operasional karena tidak diperlukannya pencetakan dan distribusi kartu, serta meningkatkan keamanan proses otorisasi dan otentikasi transaksi.

Pada tahun 2022, Tim Pengendali BSNT berencana untuk melakukan uji coba kedua dengan penyempurnaan model bisnis serta inisiasi pemanfaatan pusat data terintegrasi. Sejalan dengan persiapan uji coba tersebut saat ini tengah dilakukan penyusunan amandemen Peraturan Presiden No.63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Non Tunai.

Amandemen Perpres ini bertujuan untuk menyempurnakan peraturan terdahulu sesuai dengan perkembangan terkini serta mengakomodasi berbagai prasyarat dan ketentuan pendukung dalam implementasi digitalisasi bansos ke depan. Hasil uji coba pertama dan kedua akan turut menjadi masukan dalam penyusunan amandemen Perpres tersebut.

Setelah pelaksanaan uji coba kedua, Tim Pengendali BSNT akan mempersiapkan implementasi terbatas digitalisasi bansos di tahun 2023. Implementasi terbatas ini akan dilaksanakan khususnya di wilayah perkotaan dan didukung dengan pemanfaatan central mapper secara parsial. Pada tahap berikutnya, implementasi akan diperluas ke wilayah pedesaan dengan dukungan pemanfaatan central mapper secara penuh pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahap akhir, digitalisasi bansos akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), dengan perluasan penyalur melibatkan bank swasta dan bank daerah.

#### Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan sebuah proses panjang yang diawali dari komitmen BI bersama K/L dan dikokohkan dengan penetapan paket kebijakan Keppres No. 3 Tahun 2021, Kepmenko No. 147 Tahun 2021, dan Permendagri No. 56 Tahun 2021. Peluncuran paket kebijakan P2DD tersebut memberikan antusiasme yang tinggi kepada seluruh pihak, baik di pusat dan daerah serta berhasil mempercepat pembentukan 100% TP2DD dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan di akhir tahun 2021. BI juga telah melakukan penyempurnaan perhitungan Indeks ETPD (IETPD) sebagai instrumen untuk memetakan dan mengukur kinerja elektronifikasi. Kualitas IETPD tersebut juga terus ditingkatkan melalui pengembangan dan peluncuran Sistem Informasi P2DD (SIP2DD) sebagai sarana pelaporan ETPD pada Desember 2021.

Implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah terus ditingkatkan baik pada transaksi belanja maupun pendapatan daerah. Secara nasional, sebanyak 94,2% dari transaksi belanja langsung Pemerintah telah dilakukan secara nontunai, sedangkan untuk transaksi belanja tidak langsung sebesar 91,9%. Capaian elektronifikasi transaksi belanja tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yang mana transaksi belanja langsung sudah seluruhnya dilakukan secara non tunai, sedangkan untuk elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung telah mencapai 98,9%. Keunggulan Jawa juga terlihat dari tingginya capaian tingkat elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi, masing-masing sebesar 99% dan 78%. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi secara nasional, yang masing-masing sebesar

87,5% dan 60,7%. Digitalisasi di wilayah lainnya masih perlu didorong, terutama di wilayah Sulampua yang memiliki tingkat elektronifikasi transaksi pajak sebesar 72,6% dan retribusi 42,9%. Upaya peningkatan penerimaan retribusi di Sulampua terus dilakukan, antara lain oleh Pemprov Sulawesi Selatan dengan menyediakan portal digital di pelabuhan, terminal, area parkir, dan Rumah Sakit, sehingga sukses mendongkrak retribusi daerah dan jasa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga 30%.

Dari penggunaan kanal pembayaran dalam ETPD, kanal non digital masih lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan kanal digital. Secara nasional, kanal digital dalam transaksi Pemda masih relatif rendah, sebesar 53,8%, dikarenakan kendala biaya untuk melakukan perluasan dan pengembangan kanal digital di beberapa daerah. Pada wilayah Jawa, transaksi Pemda yang menggunakan kanal digital mencapai 82,5%, sementara di wilayah lainnya masih dalam rentang 30% s.d 55%. Tingginya penggunaan kanal digital di Jawa salah satunya disebabkan oleh kolaborasi Pemprov Jawa Barat dengan e-commerce yang sukses meningkatkan realisasi pajak dan retribusi menggunakan kanal digital. Dengan angka capaian yang belum optimal di wilayah lainnya, upaya untuk perluasan kanal digital terus dilakukan, di antaranya dengan mengimplementasikan QRIS pada berbagai transaksi pajak dan retribusi daerah serta penguatan kerjasama bilateral antara Pemda dan BPD dalam penyediaan kanal. Implementasi e-ticketing untuk pariwisata, POS Pajak Restoran, e-retribusi, e-parking dan beberapa inovasi aplikasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak lainnya juga dilakukan. Perluasan kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) juga menjadi langkah utama di sebagian wilayah karena mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dengan kanal digital.

Hasil pemetaan terhadap 542 Pemda di Indonesia yang diukur dari IETPD Semester II 2021 menunjukkan progress yang baik, dengan peningkatan jumlah Pemda di Tahap Digital. Tercatat sebanyak 199 Pemda atau 36,7% dari total Pemda telah berada di Tahap Digital, yang sebagian besar berada di wilayah Jawa (84 Pemda). Adapun jumlah Pemda pada Tahap Maju sebanyak 237 Pemda, Tahap Berkembang sebanyak 96 Pemda, dan Tahap Inisiasi sebanyak 10 Pemda. Upaya peningkatan kualitas IETPD sebagai sarana monitoring dan instrumen pengukuran kinerja ETPD terus dilakukan untuk menghasilkan indikator P2DD di tingkat nasional yang kredibel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pelaporan Pemda melalui SIP2DD. Berbeda dengan skema pelaporan pada proses perhitungan IETPD pada Semester I 2021 yang masih dilakukan melalui KPwDN Bank Indonesia, pelaporan pada Semester II 2021 telah dilakukan melalui SIP2DD.

Penerapan digitalisasi transaksi Pemda telah memberikan manfaat yang sangat besar selama tahun 2021. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PAD yang lebih baik pada Pemda yang berada pada tahapan ETPD yang lebih tinggi. Angka realisasi belanja Pemda juga mengindikasikan bahwa Pemda yang berada di tahapan ETPD yang lebih tinggi cenderung memiliki realisasi belanja lebih tinggi. Temuan tersebut turut memberi konfirmasi peran digitalisasi transaksi Pemda terhadap resiliensi keuangan Pemda di masa pandemi 2021.

#### Digitaliasi Transportasi

Evolusi SP di sektor transportasi terus mengalami perkembangan pesat. Digitalisasi transportasi terus diarahkan pada penggunaan berbagai kanal digital dengan mengedepankan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Sejalan dengan tren pembayaran digital, BI mendukung digitalisasi transportasi yang berevolusi dari berbasis kartu uang elektronik chip based menjadi berbasis rekening dengan multi instrumen. Perjalanan evolusi SP pada sektor transportasi dimulai sejak tahun 2017 ketika transaksi pembayaran jalan tol sukses menjadi 100% nontunai. Keberhasilan tersebut kemudian direplikasi ke daerah dengan perluasan elektronifikasi transportasi berbasis kartu di moda transportasi, antara lain Trans Jakarta dan Trans Jawa Tengah. Perjalanan evolusi berlanjut saat diluncurkannya QRIS pada 2019 yang kemudian menjadi *game changer* di sektor transportasi dan diikuti berbagai show case oleh daerah di seluruh Indonesia. Di tahun yang sama, BI juga menyelesaikan kajian terkait integrasi antar moda transportasi yang semakin menguatkan arah perkembangan integrasi antara moda transportasi serta digitalisasi pembayaran transportasi di Indonesia. Pada 2020, sektor transportasi semakin menggeliat, ditandai dengan diluncurkannya 2 flagship yaitu inisiasi Multi Lane Free Flow (MLFF) oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Integrasi Antar Moda Transportasi Jabodetabek oleh Pemprov DKI Jakarta yang didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.

Perkembangan pada sektor transportasi terus berlanjut pada tahun 2021 dengan berbagai pencapaian. BI bersama dengan K/L terus mendorong implementasi dan perluasan elektronifikasi transportasi di berbagai moda dengan tahapan dari Inisiasi, Perluasan, Replikasi, dan Integrasi. Bersama Kementerian Perhubungan, BI tengah melakukan implementasi elektronifikasi pada program transportasi nasional antara lain (1) Buy the Service (BTS), yaitu pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta; dan (2) Layanan Transportasi menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Program BTS tersebut telah diimplementasikan di

Palembang, Solo, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Banyumas, Banjarmasin, dan Makassar. Di samping itu, pengembangan pada transportasi tol laut juga dilakukan di wilayah Sulampua karena tingginya potensi digitalisasi transportasi laut. Saat ini, telah terdapat 13 pelabuhan yang sudah terelektronifikasi.

Selain program-program tersebut, dua program flagship yang telah diinisiasi pada tahun 2020, yaitu MLFF dan integrasi antar moda transportasi Jabodetabek mencatat perkembangan signifikan di 2021. PT Roatex telah ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana implementasi MLFF, sementara pengembangan integrasi transportasi dilakukan oleh PT Jaklingko Indonesia. Di wilayah lainnya, yaitu Sumatera, tahap awal integrasi moda transportasi juga telah dilakukan, meskipun belum mencakup integrasi sistem pembayaran. Integrasi moda transportasi di Sumatera Selatan dilakukan melalui integrasi DAMRI dengan LRT menuju bandara, sementara di Sumatera Utara telah dilakukan integrasi DAMRI dengan pelabuhan penyeberangan Danau Toba.

Pengembangan MLFF saat ini masih dalam proses finalisasi model bisnis pembayaran serta penyusunan strategi implementasi termasuk sosialisasi edukasi. Dengan implementasi MLFF ke depan, pembayaran tarif tol akan dilakukan secara otomatis tanpa berhenti dengan memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran dan Source of Fund (SoF) yang dimiliki. Pembayaran dilakukan melalui kanal e-OBU secara interkoneksi dan interoperabilitas, yang sebelumnya telah dilakukan binding antara SoF pengguna dengan kanal/e-OBU, baik secara langsung maupun melalui layanan dompet elektronik. Selanjutnya, akan dilakukan proses uji coba *piloting* yang dilanjutkan dengan implementasi secara bertahap dan pada akhirnya dapat terimplementasi secara full-scale dengan target operasi akhir tahun 2023. Pada MLFF, Bank Indonesia terus berkolaborasi dalam hal memfasilitasi dan mendorong implementasi MLFF serta memberikan guidance terkait model bisnis pembayaran MLFF agar selaras dengan prinsip SP dan ketentuan yang berlaku.

Pada integrasi antar moda transportasi, program unggulannya berupa Kartu Transportasi dan Aplikasi Jaklingko telah diluncurkan dan dapat digunakan untuk seluruh moda. Program unggulan ini merupakan bagian dari Fase I dari III fase utama pengembangan program integrasi. Saat ini proses integrasi telah mencapai fase II, yaitu pengembangan Mobility as a Service (MaaS) yang memungkinkan akses layanan secara menyeluruh menggunakan smartphone mulai dari merencanakan, memesan moda transportasi, pembelian tiket, dan melakukan perjalanan. Hal ini memungkinkan pengguna aplikasi Jaklingko dapat dengan mudah merencanakan,

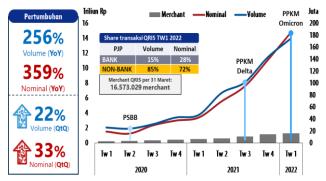
membayar, dan bepergian dari rumahnya sampai dengan tujuan, kemudian kembali ke rumah. Ke depan, pada fase III, yaitu peluncuran *Account Based Ticketing* (ABT) yang ditargetkan Agustus 2022, pengguna dapat menikmati tarif terintegrasi yang fleksibel sesuai dengan profil masingmasing pengguna. Melalui ABT, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menyalurkan subsidi transportasi secara tepat sasaran.

#### Implementasi QRIS dalam Mendukung Digitaliasi Program Pemerintah

#### Perkembangan Transaksi QRIS dan Kebijakan Bank Indonesia Terkini

Penggunaan QRIS sebagai kanal/layanan pembayaran digital terus tumbuh, dimana pada triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan 359% (yoy). QRIS telah menjadi game changer dalam perluasan ekosistem pembayaran digital, termasuk dalam mendukung digitalisasi pemerintah. QRIS tidak hanya mendorong interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara namun dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Transaksi QRIS tumbuh signifikan didukung dengan perluasan interkoneksi dan akseptasi khususnya UMKM. Pada bulan Februari 2022, nominal transaksi QRIS telah mencapai Rp4,51 triliun dan volume transaksi mencapai 54,91 juta transaksi. QRIS telah tersebar di 34 provinsi dan 480 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah merchant QRIS telah mencapai lebih dari 16 Juta merchant, dimana 90% di antaranya adalah pelaku usaha UMKM. Ekosistem QRIS saat ini didukung oleh 76 PJP berizin QRIS, baik bank maupun non bank yang saling interkoneksi. Dengan kemudahan interkoneksi tersebut, pada tahun 2022 ini diharapkan terdapat tambahan 15 juta pengguna baru sehingga total pengguna di akhir 2022 dapat mencapai 26 juta pengguna.



Grafik III.3. Perkembangan transaksi dan merchant QRIS

Berbagai kebijakan Bank Indonesia terkait QRIS juga diarahkan untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional. Pertama, penyesuaian limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta/transaksi menjadi Rp10 juta/transaksi untuk mengakomodir *use case* transaksi dengan nominal besar, serta mendukung digitalisasi di daerah dan transaksi Pemerintah. Kedua, penetapan MDR 0% bagi *merchant* mikro sehingga lebih efisien sampai dengan Juni 2022. Ketiga, pengembangan fitur dan model bisnis QRIS secara berkelanjutan bersama industri seperti QRIS Transfer, Tarik, dan Setor serta QRIS *cross border*.

Upaya perluasan QRIS terus dilakukan baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, perluasan QRIS didorong melalui peningkatan pengguna QRIS dengan target tambahan 15 juta pengguna baru QRIS di akhir tahun 2022. Sementara dari sisi supply, perluasan didorong melalui perluasan merchant yang menerima pembayaran dengan QRIS. Dalam upaya perluasan QRIS tersebut, Bank Indonesia menyusun strategi yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu Ekspansi, Edukasi dan Kampanye, serta Award. Pelaksanaan tiga pilar ini juga didukung dengan kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, komunitas serta asosiasi dan industri.

Pada pilar Ekspansi, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan menjalankan program Pasar/Pusat Belanja S.I.A.P QRIS, yaitu pemasangan QRIS pada para pedagang dan *merchant* di 250 pasar dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Strategi ekspansi juga mencakup perluasan QRIS ke komunitas prioritas, implementasi pada destinasi pariwisata, dorongan kepada PJP untuk memberikan *reward*/promo bagi pengguna, dan penguatan dukungan infrastruktur digital di *merchant* QRIS yang terletak di wilayah 3T.

Pada pilar Edukasi dan Kampanye, dilakukan sinergi pada berbagai event Bank Indonesia, seperti Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI), Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan International Shariah Economic Forum (ISEF), maupun event berskala nasional-internasional, seperti Presidensi Indonesia G20. Sinergi dengan program-program pemerintah, antara lain Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI) dan P2DD. Di samping itu, pilar edukasi juga mendorong peningkatan pemahaman dan perluasan akseptasi QRIS melalui penyusunan pedoman komunikasi PJP bagi merchant dan pengguna QRIS. Sementara pada pilar ketiga, yaitu Award, diberikan apresiasi bagi PJP, Pemprov dan merchant atas dukungan dan capaian dalam transaksi QRIS maupun aspek compliance PJP.

#### Implementasi QRIS pada Program Pemerintah

Perluasan QRIS sebagai inovasi yang mengedepankan interkoneksi dan interoperabilitas juga telah diterapkan pada tiga program digitalisasi Pemerintah, yaitu bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Pada program digitalisasi Bansos, QRIS menjadi moda transaksi utama dengan model

bisnis yang telah diuji coba untuk memastikan keandalan QRIS dalam penyaluran Bansos.

Pada program digitalisasi transaksi Pemda, QRIS telah digunakan oleh 346 Pemda di seluruh Indonesia untuk berbagai *use case* penerimaan transaksi Pemda, antara lain dalam pembayaran retribusi parkir, Samsat, serta Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perluasan pemanfaatan QRIS pada program digitalisasi Pemda juga didorong melalui penilaian program inovasi *digital payment* yang menjadi salah satu komponen aspek *output* program unggulan dalam kriteria penilaian Championship TP2DD tahun 2022.

Sementara itu, pada digitalisasi transportasi, QRIS telah digunakan untuk pembayaran parkir, pembelian tiket transportasi, pembayaran ongkos transportasi modern seperti taksi, maupun transportasi tradisional seperti andong, pete-pete dan angkot. Ke depan, perluasan pemanfaatan QRIS MPM akan dilakukan untuk integrasi moda transportasi yang *interoperable* dan pengembangan penggunaan QRIS CPM untuk moda transportasi.

#### Asesmen 3I+2K

Sebagai upaya *monitoring* digitalisasi, asesmen dengan prinsip 3I+2K (Informasi dan Data, Infrastruktur, Implementasi, Koordinasi dan Ketentuan) terus dilakukan pada masing-masing program digitalisasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti.

#### Digitalisasi Bantuan Sosial

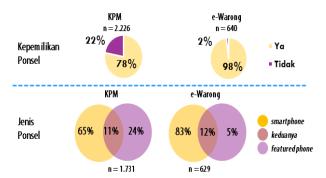
Berdasarkan hasil asesmen 3I+2K yang didukung oleh survei kesiapan digitalisasi bansos oleh KPwDN Bank Indonesia, digitalisasi bansos perlu didukung dengan upaya peningkatan kualitas data, pemenuhan ketersediaan infrastruktur, pelaksanaan koordinasi yang intensif, serta penyediaan ketentuan sebagai payung hukum untuk mewujudkan tercapainya aspek 6T (Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi).

#### Informasi dan Data

Ketersediaan data yang clean and clear merupakan sebuah prasyarat utama dalam mendukung transformasi digitalisasi bansos dan pemenuhan aspek tepat sasaran. Jumlah kepemilikan KTP-elektronik dan NIK KPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian masih terdapat isu kualitas data KPM yang saat ini belum memadai, di antaranya perbedaan data antara pemilik program dan penyalur serta data tidak valid. Kendala ini secara umum dihadapi oleh hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme perolehan data yang valid secara efisien.

#### Infrastruktur

Kepemilikan ponsel menjadi aspek penting untuk implementasi digitalisasi bansos. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan ponsel KPM sebesar 78%, sedangkan e-Warong mencapai 98%. Jenis ponsel yang dimiliki KPM dan e-Warong mayoritas sudah berjenis *smart phone* sehingga menjadi modal yang cukup bagi KPM dan e-Warong untuk bertransformasi menuju digitalisasi bansos.



**Grafik III.4.** Persentase Kepemilikan dan Jenis Ponsel KPM dan e-Warong berdasarkan hasil survei

Namun demikian, kondisi kualitas jaringan masih perlu mendapat perhatian. Masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk kategori *blankspot* khususnya di wilayah Sulampua dan Kalimantan, meskipun mayoritas daerah lainnya telah terjangkau sinyal hingga 4G.

#### **Implementasi**

Implementasi penyaluran bansos non tunai saat ini secara umum telah memenuhi prinsip 6T, baik di wilayah *blankspot* maupun *online*. Namun demikian, masih terdapat kendala umum yang dihadapi, seperti lupa PIN, kendala sinyal dan mesin EDC, serta literasi digital masyarakat yang masih belum memadai terkait penggunaan, mekanisme dan kanal digital. Di samping itu, beberapa kendala yang mengemuka di daerah diantaranya terbatasnya jumlah agen dan kantor cabang Bank, terbatasnya infrastruktur jaringan pendukung, serta masih adanya sejumlah masyarakat yang nyaman dengan skema tunai.

Sementara itu, upaya implementasi digitalisasi bansos dengan menggunakan sumber dana APBD telah diinisiasi di beberapa daerah, diantaranya: 1) Pemprov Bali dan Pemprov Jawa Timur yang memanfaatkan agen atau *merchant* dengan kartu yang dilengkapi QR, 2) Pemprov Jawa Barat melalui BJB menggunakan aplikasi social transfer fund yang telah terintegrasi dengan dashboard monitoring secara realtime.

#### Koordinasi

Tim Pengendali BSNT yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta beranggotakan 21 K/L, termasuk BI, memiliki fokus dan prioritasnya masing-masing dalam penyaluran bansos, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam aspek koordinasi. Selain itu, beberapa tantangan lain dalam hal koordinasi yang perlu ditingkatkan, diantaranya:

sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan penyaluran di masa pandemi lalu, 2) konsolidasi di daerah oleh koordinator daerah Kabupaten/Kota dalam koordinasi verifikasi dan validasi data KPM, serta 3) kesiapan dan ketersediaan pendamping untuk program sembako. Oleh karena itu dibutuhkan harmonisasi kelembagaan dalam Tim Pengendali BSNT serta koordinasi secara intensif antara pusat dan daerah agar implementasi digitalisasi bansos berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama yakni penyaluran bansos yang memenuhi prinsip 6T.

#### Ketentuan

Dalam rangka memastikan kelancaran dan tercapainya prinsip fairness dalam penyaluran bansos, diperlukan dukungan ketersediaan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan penyaluran secara digital. Ketentuan yang diperlukan untuk mendukung percepatan digitalisasi bansos, antara lain 1) Peraturan Presiden, yakni amandemen Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Non Tunai; 2) Peraturan Menteri yakni Revisi Permensos dan Revisi Permenkeu; 3) petunjuk teknis berupa Perdirjen; serta 4) Pedoman umum mengenai transformasi mekanisme penyaluran bansos secara digital. Ketersediaan ketentuan pendukung juga perlu menjadi perhatian Pemda dalam penyaluran bansos menggunakan APBD mengingat saat ini sebagian besar daerah belum memiliki ketentuan terkait penyaluran bansos secara non tunai atau digital.

#### Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara garis besar, tantangan digitalisasi transaksi Pemda dihadapkan pada berbagai kendala dalam Aspek Infrastruktur dan Implementasi. Kendala pada aspek Infrastruktur berkaitan dengan kualitas jaringan dan infrastruktur digital, sementara kendala utama pada aspek Implementasi berkaitan dengan kurangnya kesiapan, literasi ataupun awareness masyarakat, BPD, dan Pemda.

#### Informasi dan data

Dari sisi Informasi dan Data, upaya peningkatan kualitas data ETPD dilakukan dengan mendorong pemanfaatan SIP2DD. Pada semester II-2021, 535 Pemda (98,7%) telah berpartisipasi melakukan pengisian SIP2DD dengan 483 Pemda (89,1%) telah mengisi survei ETPD secara lengkap. Dari sisi Sistem Keuangan Pemda berbasis elektronik, sebanyak 523 Pemda (96,5%) telah memiliki Sistem Informasi Keuangan Pemda (SIKD). Beberapa di antaranya menggunakan lebih dari 1 (satu) sistem, dengan

penggunaan terbanyak, yaitu SIMDA (344 Pemda) dan disusul oleh SIPD (322 Pemda). Dari 523 Pemda yang telah memiliki SIKD, 201 Pemda telah terintegrasi dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

#### Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet yang stabil dan merata (2G/3G/4G) menjadi kendala yang muncul di 382 Pemda (70,5%). Hal ini antara lain disebabkan kondisi geografis yang kurang mendukung untuk pengadaan atau perbaikan di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Adapun upaya untuk mengatasi kendala ini sudah dilakukan oleh Sulawesi Selatan dalam program perluasan internet yang bekerjasama dengan *provider* jaringan seluler di kawasan pariwisata dan pasar tradisional.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur Bank RKUD juga masih menjadi kendala yang muncul di 280 Pemda (51,7%). Beberapa BPD yang menjadi Bank RKUD masih memiliki keterbatasan untuk dapat memenuhi persyaratan (POJK No.12/POJK03/2018) dalam menyediakan kanal digital, sehingga diperlukan perluasan *co-branding* pada BPD. Upaya *co-branding* dengan PJP dilakukan untuk penyediaan kanal pembayaran digital dan instrumen non tunai (QRIS, EDC, dan uang elektronik). Penguatan infrastruktur Bank RKUD melalui kerjasama dengan PJP maupun *e-commerce* lainnya perlu ditingkatkan untuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang lebih optimal.

#### **Implementasi**

Implementasi ETPD secara nasional yang diukur dari capaian IETPD masih belum merata. Capaian tertinggi terdapat di wilayah Jawa dengan 70,6% Pemda berada di tahap digital, sementara di wilayah Sulampua baru sebanyak 18,8% Pemda yang berada di tahap digital. Perbedaan tersebut didorong oleh kendala minat masyarakat dan ketersediaan infrastruktur IT yang masih perlu ditingkatkan, terutama di berbagai wilayah di luar Jawa. Dalam upaya meningkatkan implementasi ETPD tersebut, KPwDN terus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi edukasi serta capacity building untuk mendukung kapabilitas Pemda maupun literasi masyarakat. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat juga dilakukan melalui penyelenggaran event seperti Digital Festival 2022 di wilayah Sulampua. Di samping itu, inovasi program yang dilakukan dengan basis aplikasi juga dapat mendorong digitalisasi transaksi Pemda, di antaranya aplikasi 'Yanjak' yang diimplementasikan di Gorontalo sebagai platform pengelolaan database pajak dan retribusi daerah secara digital dan terintegrasi dengan kanal pembayaran QRIS.

#### Koordinasi

Dari sisi kelembagaan, aspek koordinasi dalam P2DD berjalan efektif, tercermin dari capaian pembentukan TP2DD di seluruh Pemda dan implementasi berbagai program P2DD. TP2DD telah terbentuk di 542 Pemda, yang terdiri dari 34 TP2DD Provinsi, 93 TP2DD Kota, dan 415 TP2DD Kabupaten. Meski demikian, koordinasi pusatdaerah masih perlu diperkuat, antara lain dalam penyelarasan arah kebijakan P2DD di tingkat Pusat-Daerah, serta harmonisasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD) dalam pengembangan interkoneksi sistem pemerintah pusat (SIPD dan SIP2DD) dengan sistem informasi di daerah. Di samping itu, kendala juga muncul pada forum TP2DD, yang belum optimal dalam penyusunan maupun realisasi peta jalan dan rencana aksi. Upaya percepatan penyusunan peta jalan dan rencana aksi terus dilakukan di daerah, di antaranya melalui coaching bersama Kemendagri (Bali dan NTT) serta optimalisasi peran KPwDN sebagai advisor dalam TP2DD untuk menuntun Pemda.

#### Ketentuan

Pada tataran pusat, dukungan regulasi telah ditetapkan melalui Paket Kebijakan dan Regulasi P2DD di tahun 2021 (Keppres, Kepmenko dan Permendagri). Selanjutnya, regulasi teknis terkait Peta Jalan TP2DD dan Pelaporan ETPD melalui SIP2DD masih dalam penyusunan. Paket kebijakan P2DD juga telah ditindaklanjuti pada tataran daerah, dengan 388 (72%) Pemda di antaranya telah menerbitkan regulasi daerah. Tantangan yang mengemuka di daerah dalam pembentukan regulasi di antaranya dinamisnya pergerakan/mutasi OPD serta kesesuaian rancangan peta jalan di daerah dengan pusat.

#### Digitalisasi Transportasi

Asesmen aspek 3I+2K pada digitalisasi transportasi dilakukan melalui survei kepada 46 KPwDN BI. Beberapa isu yang mengemuka dalam aspek 3I+2K antara lain terkait ketersediaan sistem data terintegrasi, area *blankspot*, serta keberadaan regulasi daerah.

#### Informasi dan data

a. Sektor transportasi: Di wilayah Jabodetabek, integrasi pengelolaan informasi dan data akan dilakukan oleh lembaga Electronic Fare Collection (EFC) yakni PT. Jaklingko Indonesia, sedangkan di daerah lainnya seperti Palembang, Solo, dan Batam masih dalam pembahasan. Saat ini, integrasi infrastruktur telah dilakukan yang akan dilanjutkan dengan integrasi pembayaran melalui kerjasama pengelolaan transportasi. Di wilayah Sulampua dan Sumatera secara umum, belum terdapat sistem pengumpulan data terintegrasi dan terstandar untuk pelaporan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya awareness dan komitmen Pemda dalam pengembangan basis data serta masyarakat yang belum mendapatkan informasi atas tersedianya pembayaran non tunai pada sektor transportasi.

b. Jalan tol: Saat ini pengelolaan data dilakukan oleh 46 BUJT dibantu oleh PJP yang berperan sebagai *Payment Gateway*. Setelah implementasi MLFF, pengelolaan data dan transaksi pembayaran akan dilakukan secara terpusat melalui *Electronic Toll Collection* (ETC), yaitu PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) yang telah ditunjuk oleh KemenPUPR.

#### Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, antara lain dukungan SP, lokasi *top up* uang elektronik, dan masih adanya area *blankspot*, masih menjadi 3 besar kendala yang dihadapi KPwDN dalam implementasi elektronifikasi transportasi di daerah, terutama KPwDN di Bali Nusra, Kalimantan, dan Sulampua. Di samping itu, terdapat kendala terkait akseptasi nontunai yang masih rendah dan *merchant* yang belum yakin dengan pembayaran nontunai.

#### **Implementasi**

Implementasi elektronifikasi transportasi telah dilakukan di berbagai daerah (63% respon KPwDN), namun potensi non tunai masih cukup luas sehingga perlu terus didorong agar lebih merata. Di Sulampua dan Balinusra, kondisi implementasi belum optimal dikarenakan tingginya preferensi masyarakat terhadap pembayaran tunai. Hal ini terutama disebabkan adanya biaya administrasi untuk pembayaran non tunai serta keterbatasan lembaga *Electronic Fare Collection* (EFC).

#### Koordinasi

Dalam rangka inisiasi SP nontunai pada layanan moda transportasi serta melakukan monitoring program elektronifikasi transportasi di daerah, upaya koordinasi terus diperkuat dengan berbagai pihak, antara lain Pemda, otoritas, perbankan, operator transportasi, penyedia sistem IT. Penguatan koordinasi tersebut mendorong terbentuknya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menerapkan implementasi non tunai di daerah.

#### Ketentuan

Pada aspek Ketentuan, ketersediaan regulasi daerah terkait elektronifikasi layanan moda transportasi di wilayah kerja KPwDN masih relatif rendah. Sebanyak 32 KPwDN (70%) menyatakan belum terdapat ketentuan Pemda, baik dalam bentuk Pergub, Perwali, maupun Perbup. Keberadaan regulasi daerah merupakan aspek penting yang menjadi landasan hukum dalam implementasi non tunai didaerah yang dapat diikuti semua pihak.

#### Rencana Ke Depan

Berdasarkan perkembangan dan asesmen 3I+2K pada masing-masing program digitalisasi, telah disusun beberapa substansi koordinasi baik jangka pendek (20222023) maupun menengah (2024-2025) untuk mempercepat implementasi digitalisasi di setiap program.

#### Digitalisasi Bantuan Sosial

Dalam rangka mendorong implementasi digitalisasi bansos secara bertahap dan terukur sesuai dengan peta jalan digitalisasi bansos yang telah dicanangkan oleh Tim Pengendali BSNT, BI akan fokus dalam 3 (tiga) substansi koordinasi berikut:

- a. Mendorong implementasi G2P 4.0 secara bertahap melalui pengembangan model bisnis, penyesuaian regulasi, penyiapan PJP, mengawal pilot project, edukasi, dan sosialisasi.
- Mendorong inisiasi pengembangan Pusat Data Terintegrasi untuk mendukung efisiensi dan tata kelola alur data integrasi bansos
- Penyiapan ekosistem SP dalam mendukung digitalisasi bansos antara lain PJP sebagai penyalur, interkoneksi dan interoperabilitas SP, serta ketersediaan agen/merchant.

Ke depan, BI berkomitmen untuk terus berkontribusi optimal dalam mendorong pengembangan dan implementasi digitalisasi bansos, diantaranya dengan mengawal implementasi digitalisasi bansos secara bertahap di perkotaan, pedesaan hingga daerah 3T khususnya terkait aspek SP, memberikan dukungan perizinan dan/atau persetujuan PJP untuk penyediaan layanan pembayaran bansos, serta monitoring kelancaran SP dan implementasi Pusat Data Terintegrasi (central mapper).

#### Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Pencapaian yang masih terus berproses akan dikuatkan dengan adanya langkah strategis ke depan serta substansi koordinasi yang menjadi pondasi keberlangsungan digitalisasi transaksi Pemda dalam waktu mendatang, yakni:

 Mendorong pelaksanaan Rakornas dan Championship untuk menjaga momentum digitalisasi dan motivasi Pemda.

- Peningkatan kualitas IETPD secara berkelanjutan sebagai tools monitoring ETPD termasuk melalui pengisian pada SIP2DD.
- Mendorong efisiensi dan percepatan proses kerjasama digitalisasi Pemda dengan PJP dan e-commerce melalui sosialisasi kepada Pemda dan pemanfaatan SIP2DD.

#### Digitalisasi Transportasi

Berdasarkan asesmen 3I+2K serta urgensi implementasi digitalisasi transportasi, maka terdapat tiga substansi koordinasi yang diusulkan, yaitu:

- Mendorong percepatan implementasi pembayaran pada moda transportasi berbasis akun dan perluasan source of fund.
- Mendorong kesiapan ekosistem SP dalam implementasi MLFF secara softlanding serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Mendorong implementasi digital payment di ekosistem sektor transportasi melalui koordinasi dengan K/L serta Pemda setempat.

Substansi koordinasi ketiga pilar digitalisasi di atas akan didukung lima aspek umum yaitu optimalisasi forum koordinasi di tingkat pusat dan daerah, koordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyediaan infrastruktur pendukung (a.l Bakti Kominfo, Kemendag, PJP, dan ASPI), melakukan pilot project secara terencana dan/atau implementasi bertahap, mendorong perkembangan ekosistem pembayaran digital melalui perluasan akseptasi masyarakat, serta pengembangan *capacity building*, edukasi dan sosialisasi.

Melalui sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga dan otoritas terkait, pelaku industri dan masyarakat, berbagai upaya percepatan digitalisasi melalui substansi koordinasi masing-masing program di atas diharapkan mampu mendukung ekonomi dan keuangan digital serta pemulihan ekonomi nasional.

# Aspek Persiapan, Sistem, dan Pelaksanaan Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Bansos

Transformasi penyaluran bansos di Indonesia telah menjadi perhatian nasional, terutama sejak adanya arahan Presiden dalam Ratas 26 April 2016 yang menekankan agar dilakukan integrasi bansos. Mandat ini selanjutnya dituangkan di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang mencakup integrasi bansos dan subsidi tepat sasaran serta digitalisasi penyaluran. Pemerintah juga tengah fokus dalam agenda reformasi perlindungan sosial yang salah satunya dilakukan melalui digitalisasi penyaluran dan mekanisme distribusi bansos. Sasaran awal transformasi ini adalah program bantuan Sembako dan PKH yang merupakan bantuan dasar bagi keluarga miskin dan rentan dan penyalurannya sangat luas. Harapannya, hal ini dapat memberikan *multiplier effect* yang besar bagi tujuan program serta berdampak pada penyaluran bantuan program perlindungan sosial lainnya.

Praktik digitalisasi bansos juga telah banyak diterapkan oleh beberapa negara lain, terutama sejak pandemi Covid-19. Pemerintah menyalurkan bansos sebagai upaya untuk meminimalisir penurunan kesejahteraan masyarakat akibat dampak pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai contoh, Filipina, Brazil dan Columbia telah menerapkan penyaluran bansos yang berbasis teknologi dan aplikasi serta bersifat customer centric, mulai dari proses penyaluran hingga pemanfaatan bansos yang secara mandiri dapat diakses oleh KPM melalui smartphone. Selain tarik tunai dan berbelanja di agen, KPM dapat melakukan aktivitas layanan keuangan lainnya seperti transfer dan pembayaran yang disediakan oleh lembaga penyalur, yakni bank dan fintech. Selain itu, tiga negara ini telah memiliki infrastruktur pusat data terintegrasi untuk memudahkan lalu lintas data serta monitoring penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

konsep digitalisasi dengan bansos dikembangkan oleh ketiga negara tersebut, Pemerintah Pengendali Indonesia melalui Tim **BSNT** mempersiapkan transformasi digitalisasi bansos yang setidaknya memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu customer centric, omnichannel, interkoneksi dan interoperable serta memanfaatkan pusat data terintegrasi atau central mapper. Keempat aspek tersebut memiliki dimensi yang sangat luas memerlukan persiapan matang implementasinya. Oleh karena itu, terdapat beberapa prekondisi yang harus terpenuhi sebelum digitalisasi bansos dapat diimplementasikan, yaitu aspek persiapan, sistem, maupun pelaksanaan. Ketiga aspek ini juga merupakan hasil pemetaan isu spasial kedaerahan yang akan menentukan keberhasilan uji coba digitalisasi bansos ke depannya.

Ditinjau dari aspek persiapan, ketersediaan payung hukum untuk implementasi digitalisasi bansos adalah hal yang paling utama. Hal ini mengingat bahwa ketentuan penyaluran bansos yang saat ini berlaku yakni Perpres No.63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Non Tunai, belum mengakomodasi aspek-aspek penyaluran bansos secara digital. Penyesuaian ketentuan ini menjadi penting untuk memastikan kelancaran implementasi dan menjamin kesesuaian peran pihak-pihak yang terlibat. Payung hukum tersebut juga harus dilengkapi dengan berbagai ketentuan atau peraturan turunan untuk mendukung teknis pelaksanaan di lapangan. Dalam menyusun payung hukum, pembagian wewenang, peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat harus didefinisikan sejelas mungkin di awal. Selanjutnya, perlu dirumuskan terlebih dahulu model bisnis, mekanisme penyaluran, sumber dana, lembaga penyalur, dan lain-lain serta dipastikan ketersediaan data yang clean and clear termasuk mekanisme dan alur distribusi data, pemrosesan dan verifikasi data.

Berikutnya dari aspek sistem, perlu dipastikan kesiapan aplikasi dan teknologi yang digunakan baik aplikasi yang digunakan oleh KPM maupun merchant. Kesiapan tersebut dilakukan melalui berbagai percobaan seperti internal testing, System Integration Testing (SIT), User Acceptance Testing (UAT), Product Trial Run (PTR) termasuk SOP operasional dan dispute resolution. Hal tersebut juga perlu dilakukan dalam mempersiapkan sistem dukcapil terkait dengan proses verifikasi face recognition untuk moda transaksi menggunakan biometrik. Selain itu, perlu dipastikan kesiapan agen/merchant terkait likuiditas dan komoditas serta kesiapan untuk melayani transaksi secara digital melalui aplikasi, yang memungkinkan seluruh transaksi dan stok produk tercatat secara otomatis di sistem. Selanjutnya, dalam rangka mendukung efisiensi dan governance pengelolaan data, pusat data terintegrasi atau central mapper mulai dapat diinisiasi diimplementasikan secara bertahap kedepannya.

Terakhir, dari aspek pelaksanaan, perlu dibentuk tim koordinasi lapangan yang solid, termasuk di dalamnya perwakilan Pemda, Dinas Sosial, dan pendamping untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara maksimal kepada KPM dan merchant. Berdasarkan lesson learned uji coba digitalisasi pertama, dalam tahapan digitalisasi bansos, proses on boarding menjadi tahapan paling krusial yang menentukan keberhasilan penyaluran bansos. Oleh karena diperlukan ketekunan dan ketelitian dalam mempersiapkan berbagai aspek, termasuk melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada KPM maupun pendamping. Hal ini penting untuk memastikan tahapan on boarding berjalan dengan baik serta proses penyaluran ke depan dapat dipantau secara sistem dengan metode monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Selain itu, sebelum benar-benar diimplementasikan secara luas, perlu dilakukan uji coba digitalisasi bansos secara bertahap dan terukur agar implementasinya kelak dapat berjalan lancar dan minim kendala.

Dalam rangka pemenuhan prasyarat atau prekondisi pada ketiga aspek tersebut, Bank Indonesia maupun setiap K/L yang terlibat di dalamnya tidak dapat bergerak masingmasing. Setiap K/L harus menjalankan masing-masing perannya secara optimal dengan tetap bersinergi dan melangkah bersama secara harmonis sebagai satu kesatuan Tim Pengendali BSNT. Dengan komitmen bersama seluruh pihak, implementasi digitalisasi bansos di Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyaluran yang lebih efektif dan efisien serta memenuhi prinsip 6T, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital serta pemulihan ekonomi nasional.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

# TIM PENYUSUN

#### **Penanggung Jawab**

Solikin M. Juhro

#### **Koordinator Penyusun**

IGP Wira Kusuma M. Abdul Majid Ikram

#### **Tim Penulis**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

#### BANK INDONESIA

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektoral dan Regional

Ph. 021-2981 8119, 2981 8868 Fax. 021-3452 489, 231 0553

